#BERSIHKANINDONESIA

IBU KOTA BARU BUAT SIAPA?

RUANG SESAK OLIGARK DAN "PEMUTIHAN"

Pada 26 Agustus 2019 [1], Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru dipindahkan dari DKI Jakarta dan akan dibangun sebagai mega proyek di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Luasnya mencapai 180.965 hektar.

Sederhananya, kawasan Ibu Kota Negara (IKN) ini dibagi tiga ring. Ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, ring dua seluas 42.000 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan ring tiga seluas 133.321 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara.

Di kawasan ini ada dua konsesi kehutanan masing-masing berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK–HA) PT. International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT. IKU), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Tanaman (IUPHHK–HT) PT. International Timber Corporation Indonesia Hutani Manunggal (PT. IHM).

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau ring satu seluruhnya berada di dalam konsesi PT. IHM sementara ring dua seluas 42.000 hektar mencakup konsesi PT. IHM dan sekaligus PT. IKU.

Mantan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bambang Brodjonegoro membenarkan bahwa PT. ITCI Hutani Manunggal (IHM) milik Sukanto Tanoto, yang menjangkau hingga 6.000 hektar, akan digunakan untuk pembangunan tahap pertama ibu kota.[2] Beberapa kali dalam berbagai media, pemerintah menyatakan lahan itu milik negara dan bisa diambil kapan saja.

Namun, dapatkah begitu saja pemegang izin rela untuk angkat kaki? Apa kompensasi atau ganti rugi yang akan didapat korporasi pemegang izin di sana?

Sementara itu, ada 10 konsesi perkebunan di atas kawasan IKN yakni 8 berada di ring dua dan tiga yakni Kecamatan Samboja dan Muara Jawa serta sisanya di Kecamatan Sepaku. Konsesi terbesar adalah PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas sekitar 17.000 hektar yang penguasaannya terhubung dengan keluarga Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi di kabinet jilid dua Jokowi - Amin.

Pada wilayah ring tiga terdapat juga 1 (satu) pembangkit listrik tenaga uap batu bara. PLTU batu bara tersebut mendapatkan izin lokasi pendirian di bawah bendera PT. Indo Ridlatama Power (PT. IRP) yang berlokasi di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.

1 https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/13351161/jokowi-ibu-kota-baru-di-sebagian-penajam-paser-utara-dan-kutai-kartanegara?page=all

2 detikFinance. 18 September 2019. Achmad Dwi Afriyadi. https://finance.detik.com/properti/d-4711795/kepala-bappenas-benarkan-lahan-ibu-kota-baru-dikuasai-sukanto-tanoto

Terdapat **94 lubang bekas tambang batu bara** yang tersebar di atas kawasan IKN. Dari jumlah tersebut 5 (lima) perusahaan terbanyak yang meninggalkan lubang tambang adalah PT. Singlurus Pratama (22 lubang), PT. Perdana Maju Utama (16 lubang), CV. Hardiyatul Isyal (10 lubang), PT. Palawan Investama (9 lubang) dan CV. Amindo Pratama (8 lubang).

Penelusuran dalam laporan ini menemukan nama-nama yang berpotensi menjadi penerima manfaat atas proyek tersebut, yaitu para politisi nasional dan lokal, beserta keluarganya yang memiliki konsesi industri ekstraktif.

Jika dilihat ring satu dan ring dua IKN, maka penguasaan konsesi didominasi oleh **Sukanto Tanoto** serta **Hashim Djojohadikusumo** lalu diikuti oleh pengusaha-pengusaha lainnya yang terkait dengan 158 konsesi tambang, sawit hingga hutan.

Hashim Djojohadikusumo juga tercatat sebagai Komisaris Utama PT. International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT. ITCI KU) yang diberikan IUPHHK-HA seluas 173.395 hektar dan tepat berada di ring dua IKN. Hashim adalah adik kandung dari **Prabowo Subianto**, Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.

Ada **Rheza Herwindo**, anak dari **Setya Novanto** mantan Ketua Umum Partai Golkar, terpidana korupsi E-KTP. Namanya tercatat di dalam 3 (tiga) perusahaan tambang batu bara yakni PT. Eka Dwi Panca, PT. Mutiara Panca Pesona, dan PT. Panca Arta Mulia Serasi. Perusahaan-perusahaan milik keluarga Setya Novanto ini ditemukan berada di ring dua lokasi IKN.

Selain itu ada nama **Luhut Binsar Pandjaitan**, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Kabinet Indonesia Maju. Pemilik perusahaan tambang batu bara ini terhubung melalui perusahaan PT. Toba Group yang anak group-nya antara lain PT. Adimitra Baratama Nusantara, PT. Trisensa Mineral Utama, PT. Kutai Energi, PT. Indomining dan kebun sawit PT. Perkebunan Kaltim Utama I yang seluruhnya berada di Kecamatan Muara Jawa yang juga merupakan lokasi ring tiga IKN. Perusahaan-perusahaan milik Luhut ini meninggalkan 50 lubang tambang yang menganga dan diduga akan mendapatkan keuntungan pemutihan dosa dari kewajiban reklamasi.

Di tempat yang tidak jauh, konsesi lain tercatat atas nama **Yusril Ihza Mahendra**, sosok ketua tim pengacara pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam sengketa pilpres 2019. Nama Yusril tercatat memiliki saham, sekaligus menjabat sebagai komisaris utama perusahaan tambang batu bara PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia di Kecamatan Sepaku lokasi ring dua IKN.

Sejak awal transaksi akan terjadi bukan kepada rakyat tetapi pada pemilik konsesi. Perusahaan-perusahaan tersebut akan diuntungkan dan menjadi target transaksi negosiasi pemerintah termasuk pemutihan lubang-lubang bekas tambang yang seharusnya direklamasi.

Beda tipe pemilik atau pengguna lahan, beda pula nasibnya. **Sejauh ini, tampaknya korporasi punya lebih banyak kesempatan bernegosiasi dengan pemerintah, ketimbang warga**. Untuk warga desa, lokasi dan apa yang akan terjadi pada desa mereka terkait lokasi ibu kota baru, semua masih misteri dan rumor. ■

Foto: ©JATAM Nasional dan JATAM Kaltim

Foto: ©JATAM Nasional dan JATAM Kaltim

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah dikemukakan resmi pada 26 Agustus 2019. Beberapa simpul alasan utama kenapa ibu kota perlu dipindahkan, dan kenapa ke Kalimantan Timur, telah diobral. Mulai dari tidak memadainya syarat kelayakan kota Jakarta sebagai situs kantor-kantor pusat pengurus negara, soal udara bersih, air bersih, transportasi, dan kepadatan penduduk, besarnya risiko bencana untuk Jakarta dibandingkan dengan Kalimantan Timur, pentingnya memiliki ibu kota negara yang berada di tengah wilayah kepulauan, hingga pengaruhnya untuk menaikkan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan keluar dari Jawa menuju Kalimantan.

Laporan ini ingin menunjukkan bahwa pengambilan keputusan mega proyek IKN senilai Rp 466 triliun[3] berpotensi untuk menjadi tidak lebih dari pemutihan dosa perusahaan dan penguasa lahan di atas 180 ribu hektar kawasan tersebut. Dana itu belum termasuk permohonan anggaran dari TNI sebesar Rp 118 triliun untuk pemindahan Markas Besar TNI.[4] Keputusan ini juga tampak sebagai operasi mega proyek bagi-bagi konsesi untuk pebisnis dan konsesi untuk oligarki pascapilpres.

Sebagai sebuah pengambilan keputusan publik, prosesnya adalah 'pengabaian total' terhadap suara dan hak masyarakat adat serta masyarakat lokal, pengabaian terhadap krisis lingkungan hidup yang berlapis dan makin berlipatganda. Tidak lebih dari rencana pembongkaran lebih lanjut energi kotor batu bara dan dikhawatirkan merupakan sebuah desain mega proyek korupsi dan kolusi melalui bagi-bagi konsesi. Jika begini, **benarkah kepentingan perlunya ibu kota baru adalah untuk kepentingan publik?**

Isu ibu kota baru terlanjur ramai, di atas basis yang belum kuat. Perangkat undang-undangnya belum ada, filosofi konsep kotanya masih dipikirkan.[5] Dari pengalaman berbagai perpindahan ibu kota di dunia ternyata butuh lebih dari satu dekade untuk persiapan mega proyek seperti ini, serta butuh kondisi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil untuk menyokong pembiayaannya. Sebuah kemewahan yang belum kita miliki saat ini dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan bahkan berisiko mengalami penurunan pada tahun mendatang.[6] Tidak mengherankan bila muncul pertanyaan di masyarakat, apakah ini sekadar untuk memaksakan adanya *'legacy'* pada masa pemerintahan Jokowi, sementara konsekuensi ke depan adalah pekerjaan rumah besar untuk generasi berikutnya; mulai dari risiko utang dan pembiayaan, risiko bangkrutnya daya dukung lingkungan dan konflik sosial.

Terlepas dari *'warning'* yang dilontarkan publik dan para ahli, tampaknya pemerintah akan tetap menggulirkan rencana ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala BAPPENAS yang baru terpilih dan berlanjutnya persiapan dengan dimenangkannya *tender* senilai Rp25 milyar oleh konsultan McKinsey untuk kajian pendalaman pra-*masterplan* IKN.[7]

BUKAN RUANG KOSONG

Pada 26 Agustus 2019 [8] , Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru dipindahkan dari DKI Jakarta dan akan dibangun sebagai mega proyek di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Jika sesuai dengan luas yang diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), luas keseluruhan wilayah IKN mencapai 180.965 ribu hektar [9], maka terdapat 4 (empat) kecamatan yang tercakup yakni Kecamatan Sepaku yang berada dalam lingkup administratif Kabupaten PPU. Sedangkan Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Loa Kulu berada dalam lingkup administratif Kabupaten Kutai Kartanegara.

---

3 Kompas.com. Diakses dari https://money.kompas.com/read/2019/09/26/120958226/sri-muyani-akui-pemindahan-ibu-kota-tetap-bebani-apbn

4 Sindonews.com. Diakses dari https://nasional.sindonews.com/read/1443484/15/pemindahan-ibu-kota-tni-butuh-anggaran-rp118-triliun-1569512507

5 CNN Indonesia, 24 Oktober 2019. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191024110731-532-442470/perencanaan-matang-jadi-pr-suharso-kepala-bappenas-baru?
Liputan 6, 24 Oktober 2019. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4093551/istri-kepala-bappenas-ternyata-anggota-pansus-ibu-kota-baru

6 Kompas.com. 10 September 2019. Sakina Rakhma Diah Setiawan https://money.kompas.com/read/2019/09/10/151200326/bank-dunia-prediksi-pertumbuhan-ekonomi-ri-di-bawah-5-persen-pada-2020

7 Detik Finance. 21 Oktober 2019. Eduardo Simorangkir. https://finance.detik.com/properti/d-4754291/mckinsey-siapkan-master-plan-ibu-kota-baru-ri-ini-rincian-tugasnya?_ga=2.220269599.682492167.1572179476-1093104853.1569053861
Tidak disebutkan secara spesifik lingkup kerja konsultan McKinsey, namun dalam artikel berita ini disebutkan secara keseluruhan tugas Tim Kajian Pendalaman yakni meliputi .. "antara lain analisis lokasi beserta aspek-aspek terkait seperti proyeksi penduduk, tahapan pemindahan IKN, analisis risiko pembiayaan, dan analisis sosial ekonomi. Kemudian penyusunan konsep awal master-plan dan zonasi kawasan IKN beserta kawasan penyangganya, serta penyusunan konsep mobilisasi investasi, insentif relokasi, serta kelembagaan dan regulasi yang diperlukan"

8 https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/13351161/jokowi-ibu-kota-baru-di-sebagian-penajam-paser-utara-dana-kutai-kartanegara?page=all

9 https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/152349265/luas-ibu-kota-baru-di-kalimantan-timur-hampir-3-kali-dki-jakarta?page=all

PERSEBARAN KONSESI DI LAHAN IBUKOTA

Lokasi IKN I   Lokasi IKN 2   Lokasi IKN 3

Provinsi Kalimantan Timur

Kab. Kutai Kartanegara

Selat Makassar

Kota Balikpapan

Provinsi Kalimantan Timur

Kab. Penajam Paser Utara

Selat Makassar

1. PT. Praktisindo Sarana
2. PT. Indo Jaya Prima
3. PT. Tina Yusuf
4. PT. Harapan Kota Tepian
5. PT. Bara Utama Jaya
6. CV. Trovells
7. KOP. Paser Jaya
8. CV. Kharisma Luisa
9. KSU. Cipta Karya Tani
10. PT. Semoi Prima Lestari
11. PT. Palawan Investama
12. PT. Tina Yusuf
13. PT. South Pasific Resources
14. PT. Prakarsa Mitra Abadi
15. PT. Harta Hadir Mining
16. PT. Bumi Energy Kaltim
17. CV. Angkasa Bumi Sakti
18. PT. Karya Bara Utama
19. PT. Payogan Kutai Sejahtera
20. PT. Harta Hadir Mining
21. PT. Tina Yusuf
22. PT. Fusion Excel
23. PT. Cipta Bina Reksa
24. KOP. Pertambangan Padaidi
25. PT. Citra Family Mandiri
26. CV. Alam Permai
27. PT. Anugrah Setia Jaya
28. PT. Aesel Indonesia
29. PT. Kalla Arebamma
30. PT. Tina Yusuf
31. PT. Semesta Raya Mineral
32. PT. Harjo Mas Makmur
33. PT. Mahardika Novitasari
34. PT. Mandiri Sejahtera Energi
35. PT. Harapan Kota Tepian
36. PT. Bara Utama Jaya
37. PT. Kalla Arebama
38. PT. Satanger Mineral Energy
39. PT. Tabalar Coal Mining
40. PT. Andalan Alam Semesta
41. PT. Kalla Arebamma
42. PT. Kartanegara Coal Mining
43. PT. Mak Kado Internasional
44. PT. Dimensi Keajaiban Global
45. PT. Tina Yusuf
46. PT. Adi Mecha Kontekindo
47. PT. Samboja Perdana Agung
48. PT. Pinang Satu
49. PT. Satanger Mineral Energy
50. PT. Mutiara Panca Pesona
51. PT. Anugrah Setia Jaya
52. PT. Anugrah Setia Jaya
53. PT. Farida Mulya Sejahtera
54. PT. Panca Artha Mulia Serasi
55. PT. Anugrah Setiajaya
56. PT. Harmoni Stone Trading
57. PT. Pratama Energy Alam
58. PT. Anugrah Setiajaya
59. PT. Binabara Bersama
60. PT. Pratama Energi Alam Tujuh
61. PT. Nusa Lucky Tama
62. PT. Bara Budiman Abadi
63. PT. Eka Dwi Panca
64. PT. Alpha Mas Sejahtera
65. PT. Batuah Sapta Mineral
66. PT. Mitra Mahakam Perkasa

1. ITCHI Hutani Manunggal
2. ITCHI Kartika Utama
3. PT. Inhutani I Batuampar
4. Kawasan Suaka Alam - KSA

1. PT. Kaltim Bangun Jaya
2. PT. Agro Indomas - EK
3. PT. Kutai Inti Utama
4. PT. Alam Jaya Persada
5. PT. Kaltimex Jaya
6. PT. Perkebunan Kaltim Utama I

43. PT. Kutai Permata Nusantara
44. PT. Perdana Maju Utama
45. CV. Sumber Alam Borneo
46. PT. Mitra Energi Agung
47. CV. Batuah Prima Coal

1. PT. Indomas Karya Jaya
2. CV. Labbaika
3. CV. Wiraco
4. PT. Kaltim Batununggal
5. CV. Artha Pratama Jaya
6. CV. Firman Bersaudara
7. KSU. Gerbang Petani Mandiri
8. CV. Ariya Futa
9. CV. Almadani Mandiri
10. CV. Pandawa Tujuh
11. CV. Mery Jaya
12. PT. Global Inti Energi
13. KOP. Tahta Pokmas IDT
14. PT. Perdana Maju Utama
15. PT. Binamitra Sumberarta
16. PT. Kutai Energi
17. CV. Benua Bara Lestari
18. PT. Bintang Prima Energy Pratama
19. CV. Artha Jaya Mandiri
20. CV. Borneo Primamas
21. PT. Adimitra Baratama Nusantara
22. CV. Bunga Bone
23. PT. Kutai Energi
24. PT. Globalindo Inti Energi
25. CV. Indra Sakti
26. PT. Trisenda Mineral Utama
27. CV. Prima Mandiri
28. CV. Aji Baratama
29. CV. Elynda Jaya
30. PT. Adas Abadi
31. CV. Permata Hitam Indah

1. CV. Wana Artha
2. CV. Betuah
3. PT. Borner Bara Timur Mandiri
4. PT. Bukit Raya Coal Mining
5. CV. Citra Family Mandiri
6. CV. Mangkuraja
7. CV. Amindo Pratama
8. CV. Java Hunian
9. CV. Sawitto Mandiri
10. CV. Kharisma Luisa
11. CV. Arimbi Prima Coal
12. CV. Adi Putro
13. CV. Rahmat Nikmat
14. CV. Mitra Mahakam Utama
15. PT. Tina Yusuf
16. PT. Sumber Permata Hitam
17. PT. Prakarsa Mitra Abadi
18. PT. Bumi Energy Kaltim
19. CV. Hardiyatul Isyal
20. CV. Berkah Ilahi
21. PT. Jaya Prima
22. CV. Rahmat
23. CV. Mutiara Prima
24. CV. Padang Bara Abadi
25. CV. Dwi Karya Pratama
26. CV. Artha Coal
27. CV. Fazar Utama
28. PT. Gunung Harang Sejahtera
29. PT. Lembuswana Perkasa
30. CV. Arwana Prima Coal
31. CV. Energi Bumi Kartanegara
32. PT. Bbunga Masamba
33. CV. Arjuna Mandiri
34. CV. Rizky Mulya Sejahtera
35. CV. Batu Permata Hitam
36. CV. Elida Sari
37. CV. Brian Utama
38. CV. Wulu Bumi Sakti
39. CV. Rizki Jabal Bara
40. CV. Rahmat Illahi
41. CV. Bima Nusa
42. PT. Agung Paser Naraya

KONSESI PERKEBUNAN | KONSESI PERKEBUNAN | KONSESI TAMBANG KEC. SEPAKU | KONSESI TAMBANG KEC. SAMBOJA | KONSESI TAMBANG KEC. MUARA JAWA

U

0 10 20 40 KM

Secara sederhana dapat dikategorikan melalui tiga ring cakupan wilayah. Ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, ring dua seluas 42.000 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan ring tiga seluas 180.965 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara.

Terdapat 26 (dua puluh enam) desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku, 23 (dua puluh tiga) desa dan kelurahan di Kecamatan Samboja, 8 (delapan) desa dan kelurahan di Kecamatan Muara Jawa serta 15 (lima belas) desa dan kelurahan di Kecamatan Loa Kulu. Jumlah penduduk [10] di masing-masing kecamatan sebagai berikut: Sepaku sebanyak 31.814 jiwa (2018), Samboja sebanyak 63.128 jiwa (2017) dan kecamatan Muara Jawa 37.857 jiwa (2017) dan Loa Kulu sebanyak 52.736 jiwa (2017).

Dari penelusuran di atas, kawasan yang akan diproyeksikan sebagai IKN mulai dari Kawasan Inti Pemerintahan, Kawasan IKN hingga Kawasan Perluasan IKN bukanlah ruang kosong. Sebab sebelumnya sudah dipenuhi oleh izin-izin dan konsesi seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, PLTU dan konsesi bisnis lainnya.

Terdapat **162** konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit dan PLTU batu bara di atas wilayah total kawasan IKN seluas 180.000 hektar yang setara dengan tiga kali luas DKI Jakarta. Itu belum termasuk 7 proyek properti di kota Balikpapan. Hasil penelusuran menunjukkan ada 148 konsesi di antaranya adalah pertambangan batu bara, baik yang berstatus Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 1 (satu) di antaranya berstatus Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Izinnya diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan nama PT. Singlurus Pratama seluas 24.760 hektar yang seluruh konsesinya masuk dalam cakupan IKN. Konsesi pertambangan saja sudah mencapai **203.720** hektar yang seluruhnya masuk dalam kawasan IKN.

Terdapat pula 2 (dua) konsesi kehutanan masing-masing berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK–HA) PT. International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT. IKU), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Tanaman (IUPHHK–HT) PT. International Timber Corporation Indonesia Hutani Manunggal (PT. IHM).

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau ring satu seluas 5.644 hektar seluruhnya berada di dalam konsesi PT. IHM sementara ring dua seluas 42.000 hektar mencakup konsesi PT. IHM dan sekaligus PT. IKU.

Ditemukan pula 10 konsesi perkebunan di atas kawasan IKN yakni 8 (delapan) berada di ring dua dan tiga yakni Kecamatan Samboja dan Muara Jawa serta sisanya di Kecamatan Sepaku. Salah satu yang terbesar adalah PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas sekitar 17.000 hektar yang penguasaannya terhubung dengan keluarga Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi di kabinet jilid dua Jokowi-Amin.

Pada wilayah ring tiga terdapat juga 1 (satu) pembangkit listrik tenaga uap batu bara. PLTU batu bara tersebut mendapatkan izin lokasi pendirian di bawah bendera PT. Indo Ridlatama Power (PT. IRP) yang berlokasi di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terdapat **94 lubang bekas tambang batu bara** yang tersebar di atas kawasan IKN. Dari jumlah tersebut 5 (lima) perusahaan terbanyak yang meninggalkan lubang tambang adalah PT. Singlurus Pratama (22 lubang), PT. Perdana Maju Utama (16 lubang), CV. Hardiyatul Isyal (10 lubang), PT. Palawan Investama (9 lubang) dan CV. Amindo Pratama (8 lubang).

Sejak awal transaksi akan terjadi bukan kepada rakyat tetapi pada pemilik konsesi. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga akan diuntungkan dan menjadi target transaksi negosiasi pemerintah termasuk potensi pemutihan lubang-lubang bekas tambang yang seharusnya direklamasi.

10 BPS Kutai Kartanegara Dalam Angka

PERSEBARAN KONSESI HUTAN DI LAHAN IBUKOTA

Lokasi IKN 1 | Lokasi IKN 2 | Lokasi IKN 3

Provinsi Kalimantan Timur
KSA.Bukit Soeharto
Kab. Kutai Kartanegara
Selat Makassar
Kota Balikpapan
Kab. Penajam Paser Utara

KONSESI HUTAN
- ITCHI Hutani Manunggal
- ITCHI Kartika Utama
- PT. Inhutani I Batuampar
- Kawasan Suaka Alam - KSA
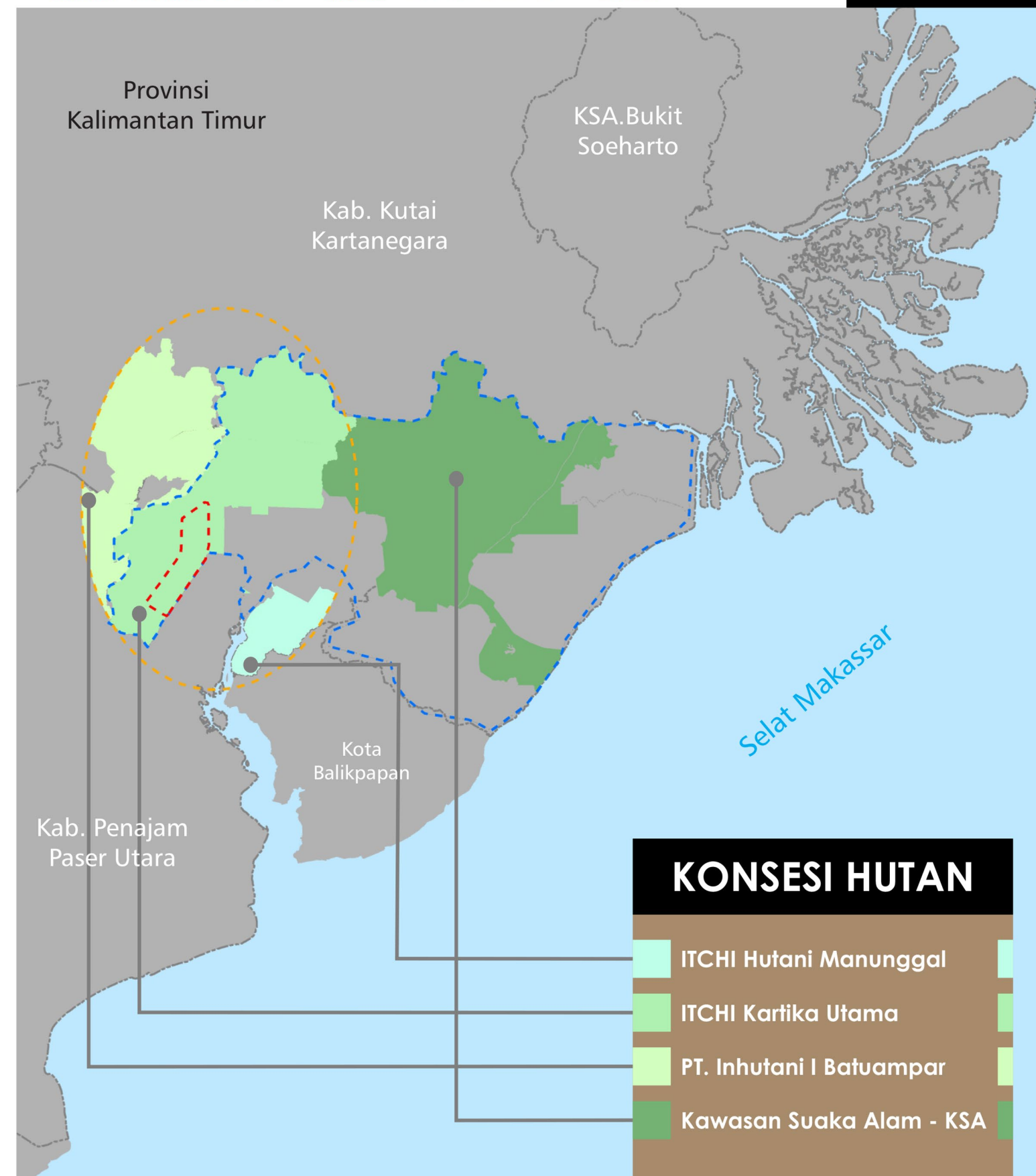
KONSESI HUTAN

0 10 20 40
KM

AROMA OLIGARKI PILPRES DI BALIK MEGA PROYEK IKN

Ide awal mengenai rencana pemindahan ibu kota ini terlontar beberapa waktu menjelang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa pemilu presiden yang berlangsung 29 April 2019 [11], atau hanya berselang 12 hari setelah hari pencoblosan pemilu presiden pada 17 April 2019.

Banyak respon dan komentar atas lontaran mendadak ini. Mulai dari anggapan bahwa ini hanya upaya Jokowi untuk menurunkan tensi pemilu yang kala itu sedang memanas. Ada juga yang menganggap ini adalah bentuk kepercayaan diri Jokowi akan memenangkan pemilu, hingga menyebut rencana tersebut hanya pengalihan isu belaka.[12] Meskipun banyak disanggah, tetap saja konteks penyampaian rencana pemindahan ibu kota memang tidak bisa dilepaskan dari ruang dan waktu pilpres.

Protes utama muncul dari partai-partai kubu 02 atau lawan Jokowi saat pilpres [12], seperti beberapa politisi utama Partai Gerindra yang menyebut pemindahan ibu kota adalah omong kosong dan menolak pemindahan tersebut.[14] Meskipun Prabowo menerima dengan syarat, kebanyakan pengurus Partai Gerindra menolak dan mengkritisi rencana tersebut.

Prabowo menyebut bahwa pemindahan ibu kota awalnya inisiasi Gerindra sejak 2014. "Namun libatkan ahli dan pakar untuk mencari tempat terbaik yang akan dijadikan lokasi Ibu Kota Indonesia yang baru, harus dicari pakar dan konsensus yang baik ya," ujar pesaing Jokowi itu pada 17 Agustus 2019 [15].

Namun, sontak penolakan Partai Gerindra ini berputar haluan setelah pertemuan kedua Jokowi dengan Prabowo di Istana pada 11 Oktober 2019 lalu. Setelah berswafoto bersama, Prabowo dan partainya mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota tanpa syarat.[16] Selain membahas soal kemungkinan koalisi dalam kabinet setelah rekonsiliasi dan pembagian jatah jajaran pimpinan MPR-DPR di Senayan, pemindahan ibu kota memang menjadi topik pertemuan kedua tersebut.

Cepat atau lambat, persetujuan Prabowo memang sudah diprediksi jauh waktu. Lahan milik PT. ITCI Kartika Utama yang berada di lahan seluas 42.000 hektar dalam ring dua wilayah IKN dimiliki oleh Hashim Djojohadikumo atau adik kandung Prabowo Subianto sendiri.[17] Bukan hanya itu, infrastruktur proyek lain di bawah naungan Arsari Group yakni PT. Arsari Tirta Pradana[18] berupa bendungan atau danau buatan yang diduga akan menyediakan sumber air bersih untuk kebutuhan ibu kota baru tersebut. Hashim sendiri berperan sebagai Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga dan penyokong utama dana politik Prabowo-Sandiaga di pilpres 2019 lalu.[19]

Semua rentetan kejadian ini menunjukkan indikasi kuat bahwa **sejak digulirkan rencana pemindahan ibu kota yang dikemas dalam mega proyek ini adalah komoditas politik semata. Di tengah jalan, ia menjadi komoditas dagangan politik untuk ditawarkan pada sederet pengusaha, pendukung kubu penguasa maupun lawan politiknya. Ujung-ujungnya, menguntungkan para oligarki politik belaka.**

11 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190430161116-32-390887/pemindahan-ibu-kota-dan-upaya-turunkan-tensi-tinggi-pemilu
12 https://news.detik.com/berita/d-4532044/fadli-bilang-pemindahan-ibu-kota-pengalihan-isu-omong-kosong-jokowi
13 https://news.detik.com/berita/d-4678735/suara-suara-sumbang-tolak-pemindahan-ibu-kota
14 https://www.cnbcindonesia.com/market/20190816171953-19-92615/fadli-zon-tolak-pemindahan-ibu-kota
15 http://www.rmolbanten.com/read/2019/08/17/10751/Prabowo-Tolak-Usul-Jokowi-ibu kota-Pindah-Ke-Kalimantan-
16 https://nasional.kompas.com/read/2019/10/11/16311371/setelah-bertemu-jokowi-prabowo-nyatakan-dukung-pemindahan-ibu-kota
17 https://www.tribunnews.com/regional/2019/10/02/lokasi-ibu-kota-baru-berada-di-lahan-perusahaan-adik-prabowo-ini-harapan-bambang-brojonegoro
18 https://beritagar.id/artikel-amp/berita/lahan-di-calon-ibu-kota-baru-bukan-milik-prabowo-tapi-hashim
19 https://nasional.kompas.com/read/2019/01/22/14310851/hashim-pak-jokowi-tak-keluarkan-uang-karena-uangnya-dari-saya

DAFTAR PANJANG OLIGARKI INDUSTRI EKSTRAKTIF

Mega proyek IKN di Kalimantan Timur teridentifikasi akan menguntungkan kepentingan segelintir penguasa lahan yakni tambang batu bara, sawit, kayu, dan pembangkit listrik tenaga uap batu bara serta pengusaha properti. Lebih dari itu, proyek besar ini diduga kuat akan menjadi jalan pemutihan atau cuci dosa perusahaan atas perusakan lingkungan yang telah dilakukan di tanah Kalimantan Timur.

Penelusuran dalam laporan ini menemukan nama-nama yang berpotensi menjadi penerima manfaat atas proyek tersebut, yaitu para politisi nasional dan lokal, beserta keluarganya yang memiliki konsesi industri ekstraktif.

Jika dilihat ring satu dan ring dua IKN, maka penguasaan konsesi didominasi oleh **Sukanto Tanoto** serta **Hashim Djojohadikusumo** lalu diikuti oleh pengusaha-pengusaha lainnya yang terkait dengan 158 konsesi tambang, sawit hingga hutan.

Hashim Djojohadikusumo juga tercatat sebagai Komisaris Utama PT. International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT. ITCI KU) yang diberikan IUPHHK-HA seluas 173.395 hektar dan tepat berada di ring dua IKN. Hashim adalah adik kandung dari **Prabowo Subianto**, Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju yang sebelumnya menjadi rival Jokowi pada pilpres 2019. PT. ITCI Kartika Utama mengantongi SK Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA) dengan nomor SK.160/Menhut-II/2012.

Sukanto Tanoto adalah penguasa konsesi berikutnya yang berada di Kawasan Inti Ibu Kota Negara. Ia memegang konsesi IUPHHK – HT PT. International Timber Corporation Indonesia Hutani Manunggal (PT. ITCI HM). Konsesi ini memiliki luas 161.127 hektar, dan seluruh kawasan inti IKN atau ring satu seluas 5.644 hektar berada di lahan konsesi Sukanto Tanoto yang sebelumnya didapatkan dari Hashim Djojohadikusumo pada tahun 2006.

Nama yang muncul juga adalah **Rheza Herwindo**, anak dari **Setya Novanto** mantan Ketua Umum Partai Golkar, terpidana korupsi E-KTP. Namanya tercatat di dalam 3 (tiga) perusahaan tambang batu bara yakni PT. Eka Dwi Panca, PT. Mutiara Panca Pesona, dan PT. Panca Arta Mulia Serasi. Perusahaan-perusahaan milik keluarga Setya Novanto ini ditemukan berada di ring dua lokasi IKN.

Penguasa konsesi lainnya yakni **Luhut Binsar Pandjaitan**, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Kabinet Indonesia Maju. Pemilik perusahaan tambang batu bara ini terhubung melalui perusahaan PT. Toba Group yang anak *group*-nya antara lain PT. Adimitra Baratama Nusantara, PT. Trisensa Mineral Utama, PT. Kutai Energi, PT. Indomining dan kebun sawit PT. Perkebunan Kaltim Utama I yang seluruhnya berada di Kecamatan Muara Jawa yang juga merupakan lokasi ring tiga IKN. Perusahaan-perusahaan milik Luhut ini meninggalkan 50 lubang tambang yang menganga dan diduga akan mendapatkan keuntungan pemutihan dosa dari kewajiban reklamasi.

Di tempat yang tidak jauh, konsesi lain tercatat atas nama **Yusril Ihza Mahendra**, sosok ketua tim pengacara pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam sengketa pilpres 2019. Nama Yusril tercatat memiliki saham, sekaligus menjabat sebagai komisaris utama perusahaan tambang batu bara PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia di Kecamatan Sepaku lokasi ring dua IKN.

Konsesi tambang terbesar yang masuk dan tercakup dalam kawasan IKN berikutnya adalah konsesi perusahaan tambang batu bara milik PT. Singlurus Pratama. Saham mayoritas PT. Singlurus Pratama dimiliki oleh Lanna Resources Public Company, sebuah perusahaan terbuka asal Thailand. Saham mayoritas lainnya juga dimiliki PT. Harita Jayaraya. Perusahaan ini dimiliki oleh keluarga taipan **Lim Hariyanto Wijaya Sarwono** bersama istrinya **Rita Indriawati**. Rita dalam data *International Consortium for Investigatif Journalist* (ICIJ) tercatat memiliki perusahaan yang terkait dengan kasus *offshore leaks.* Melalui penelusuran ditemukan salah satu pemilik saham PT. Lanna Harita Indonesia, yakni PT. Harita Mahakam Mining, 95% sahamnya tercatat dimiliki PT Harita Jayaraya dan sisanya 5% terhubung dengan Yayasan Keluarga Besar Polri Brata Bhakti.

Di sektor penyediaan bisnis air bersih, PT. Arsari Tirta Pradana milik Hashim Djojohadikusumo berpotensi besar untuk meraup keuntungan. Hal itu dikarenakan kebutuhan air bersih akan meningkat seiring dengan datangnya jutaan penduduk baru di wilayah calon ibu kota. Tidak hanya Hashim yang akan untung, di

DAFTAR AKTOR YANG MENDAPAT UNTUNG?

1. BORNEO BARA TIMUR MANDIRI
Luas: 2433.99 **Pemilik saham:** PT Multi Energy Sumber Artha, Ny Ir Th Av Fenny Fk **Komisaris:** Ny Ir Th Av Fenny Fk, Alvin C Arifin (Komisaris Utama) **Direksi:** Thoriq Mahmud **Keterangan:** Thoriq Mahmud diduga adalah ketua MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Anak dari musisi Rinto Harahap.

2. PT MUTIARA PANCA PESONA
Luas: 4772.87 **Pemilik saham:** Rheza Herwindo, Ir Sujono, RD Buyung Rustam Effendi **Komisaris:** Rheza Herwindo **Direksi:** Ir Sujono **Keterangan:** Rheza Herwindo adalah putra dari Setya Novanto. Nama Sujono sama dengan sosok Office Boy yang dijadikan Setya Novanto sebagai direktur di perusahaan yang terlibat korupsi E KTP. Ada juga nama RD Buyung Rustam Effendi, dia orang dekat SN yang diduga kuat terlibat korupsi EKTP.

3. PT KALLA AREBAMMA
Luas: 3810.84 **Pemilik saham:** PT Bina Makmur Sejati, PT Cahaya Sukses Makmur **Komisaris:** Maria Lince Lidwina **Direksi:** Margono, Hubertus Dasilva (Dirut), Ariyono Gumay, Iteng Yo Han, Yeremi Vincentius **Keterangan:** Ariyono Gumay merupakan tokoh besar di Bengkulu sebagai pengusaha batubara dan juga politisi partai PPP. Sementara Iteng Yo Han memiliki perusahaan offshore leaks berdasarkan data ICIJ.

4. PT PANCA ARTA MULIA SERASI
Luas: 2433.99 **Pemilik saham:** Rheza Herwindo, Ir Sujono, RD Buyung Rustam Effendi **Komisaris:** Rheza Herwindo **Direksi:** Ir Sujono **Keterangan:** Rheza Herwindo adalah putra dari Setya Novanto. Nama Sujono sama dengan sosok Office Boy yang dijadikan Setya Novanto sebagai direktur di perusahaan yang terlibat korupsi E KTP. Ada juga nama RD Buyung Rustam Effendi, dia orang dekat SN yang diduga kuat terlibat korupsi EKTP.

5. PT TINA YUSUF
Luas: 3793.04 **Pemilik saham:** Christina Indrayati Gunawan, Ishwar Rupchand Jethnani, Jeni, Ny Yanti **Komisaris:** Christina Indrayati Gunawan, Jeni **Direksi:** Ishwar Rupchand Jethnani, Ny Yanti.

6. PT NUSA LUCKYTAMA
Pemilik saham: Suryo Soo, Yanuar Chayadi Wijaya **Komisaris:** Suryo Soo, Yanuar Chayadi Wijaya **Direksi:** Yanuar Chayadi Wijaya **Keterangan:** Yanuar Chayadi Wijaya merupakan pendiri wikimedia.

7. PT DIMENSI KEAJAIBAN GLOBAL
Pemilik saham: PT JS Nabea Bumi International, Nadham Yusuf, Asyhab Azis, Asyhab Azis, Vidi Dominianto, Achmad Alwi SH, Kahar Muzakkar, Abdul Hakim, Jamian Ali Bethan **Komisaris:** Nadham Yusuf, Asyhab Azis, Kahar Muzakkar, Abdul Hakim, Jamian Ali Bethan **Direksi:** Vidi Dominianto, Achmad Alwi SH **Keterangan:** Nadham Yusuf merupakan ketua DPC Gerindra Kota Makassar. Sementara Asyhab Aziz merupakan pengurus DPD Gerindra di Sulsel.

8. PT HARMONI STONE TRADING
Pemilik saham: PT Limnas Tunggal, PT Siji Mitra Energi **Komisaris:** Itek Bachtiar **Direksi:** Jusun Jusuf Margetan, Maliana Herutama Malkan.

11. PT ALPHA MAS SEJAHTERA
Pemilik saham: Niket Maheshkumar Parikh, Janamurti, Tjhai Khin Hoat **Komisaris:** Tjhai Khin Hoat, Niket Maheshkumar Parikh **Direksi:** Janamurti **Keterangan:** Seharusnya perusahaan ini PMA, bukan PMDN.

12. PT INDO JAYA PRIMA
Pemilik saham: Estini Meilana, Muhammad Raja Owen Kuaygarond **Komisaris:** Dusit Kuaygarond, Jevie Purnama Sugiharto **Direksi:** Estini Meilana

13. PT SATANGER MINERAL ENERGY
Pemilik saham: Haji Muhammad Andi Sofyan Yusuf, PT Dwimitra Multi Mineral Indonesia, Irwan Liu Gunawan **Komisaris:** Irwan Liu Gunawan **Direksi:** Haji Muhammad Andi Sofyan Yusuf.

14. PT FUSION EXCEL
Pemilik saham: PT Limnas Tunggal, PT Siji Mitra Energi **Komisaris:** Itek Bachtiar **Direksi:** Jusun Jusuf Margetan, Maliana Herutama **Keterangan:** Itek merupakan pemilik perusahaan PT Limnas Tunggal. Dari catatan media, perusahaan PT Limnas menjual batubara ke PLTU Indramayu dan ke china.

15. PT MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO
Pemilik saham: Dedy Yanto, Eddy, Natio Nelsy Widjaya, Ricco Hertanto, Prof Yusril Ihza Mahendra **Komisaris:** Drs Victor Edison Simanjuntak, Eddy, Natio Nelsy Widjaya, Ricco Hertanto, Prof Yusril Ihza Mahendra (komisaris utama) **Direksi:** Dedy Yanto, Sururudin SH **Keterangan:** Victor Edison merupakan purnawirawan polisi berpangkat Brigjen, dan caleg DPR RI dari NAsdem dapil Sumut I, Dedy Yanto merupakan wakil DPW PAN Bengkulu. dan anggota DPRD Kota Bengkulu, Yusril merupakan pengacara TKN dalam gugatan Mahkamah Konstitusi dan ketua Partai PBB.

16. PT SEMOI PRIMA LESTARI
Pemilik saham: Kevin Wijaya Santoso Tan, Yuwono Siauw, Midy Nagawaty, Midy Nagawaty, Tanty Elsany Lo, Fenny Siauw, Welly Susanto Siauw **Komisaris:** Tanty Elsany Lo, Fenny Siauw **Direksi:** Kevin Wijaya Santoso Tan, Yuwono Siauw, Midy Nagawaty.

17. PT SOUTH PASIFIC RESOURCES
Pemilik saham: Elisa Hakim, Oei Wiriyanson, Steven Wiputra, Heng Shirley **Komisaris:** Elisa Hakim, Heng Shirley **Direksi:** Tumarno, Oei Wiriyanson, Steven Wiputra.

18. PT PRAKARSA MITRA ABADI
Pemilik saham: Jelinah, Fitri Ratnasari **Komisaris:** Jelinah **Direksi:** Fitri Ratnasari.

19. PT PRAKTISINDO SARANA
Pemilik saham: Jeffrey Adam Dalimunthe, Devindo Adam Dalimunthe, Rita Dalimunthe, Rudi Hariyadi, Herry Anthony Gultom **Komisaris:** Jeffrey Adam Dalimunthe, Rita Dalimunthe, Herry Anthony Gultom **Direksi:** Devindo Adam Dalimunthe, Rita Dalimunthe, Herry Anthony Gultom, Rudi Hariyadi.

20. PT HARAPAN KOTA TEPIAN
Pemegang saham: Herlina, Irwan Nurtanio, Jehezkiel Rachman Timotius, Irawan Timotioes, Irawan Timotioes **Komisaris:** Herlina, Jehezkiel Rachman Timotius **Direksi:** Irwan Nurtanio, Irawan Timotioes **Keterangan:** Irwan Nutanio juga direktur utama Bara Jaya Utama.

21. PT SAMBOJA PERDANA AGUNG
Pemegang saham: Irvan Shahruzaman, Teddy Tanniel, Handoko Halim, Victor Luhur, Dharmawan Nurtanio, Whitlam Luhur, PT Singa Sakti Sejahtera **Komisaris:** Irvan Shahruzaman, Teddy Tanniel, Handoko Halim, Victor Luhur **Direksi:** Dharmawan Nurtanio, Whitlam Luhur **Keterangan:** Victor Luhur juga punya offshoreleaks dari catatan ICIJ, Whitlam tercatat punya offshore leask di ICIJ.

22. PT BARA UTAMA RAYA
Pemilik saham: Rudiyanto, Ir Mohamad Arizan Rahmatillah, Ir Satrio Adji **Komisaris:** Rudiyanto **Direksi:** Ir Mohamad Arizan Rahmatillah, Ir Satrio Adji **Keterangan:** Satri Adji diindikasikan juga bekerja di BUMN Wijaya Karya.

23. PT PAYOGAN KUTAI SEJAHTERA
Pemilik saham: H Iskandar, dr H Nirwana SpA, H Hariyanto SH **Komisaris:** dr H Nirwana SpA, H Hariyanto SH **Direksi:** Ahmad Mubarak, H Iskandar **Keterangan:** Ahmad Mubarak diduga kuat kader partai PAN di Tenggarong.

9. PT KREASI LESTARI PRATAMA
Pemilik saham: Pasific Fiber Limited, PT Firdaus Mitra Utama **Komisaris:** Suhadi **Direksi:** Ir Rachman Aryana **Keterangan:** Perusahaan Pasific Fiber Limited beralamat di negara suaka pajak, British Virgin Island.

24. PT BATUAH SAPTA MINERAL
Pemilik saham: Srinata Mahajati Corpora, Wahyu Sardjono **Komisaris:** Ari Julindra **Direksi:** Wahyu Sardjono.

25. PT EKA DWI PANCA
Pemilik saham: Rheza Herwindo, Ir Sujono, RD Buyung Rustam Effendi **Komisaris:** Rheza Herwindo **Direksi:** Ir Sujono **Keterangan:** Rheza Herwindo adalah putra dari Setya Novanto. Nama Sujono sama dengan sosok Office Boy yang dijadikan Setya Novanto sebagai direktur di perusahaan yang terlibat korupsi E KTP. Ada juga nama RD Buyung Rustam Effendi, dia orang dekat SN yang diduga kuat terlibat korupsi EKTP.

26. PT ADI MECHA KONTEKINDO
Pemilik saham: Whitlam Luhur, Dharmawan Nurtanio, Victor Luhur, Ir Ahmad Bakri Putra, Joy Soelistyo, Teddy Tanniel, PT Singa Sakti Sejahtera **Komisaris:** Teddy Tanniel, Joy Soelistyo, Ir Ahmad Bakri Putra **Direksi:** Whitlam Luhur, Dharmawan Nurtanio **Keterangan:** Victor Luhur juga punya offshoreleaks dari catatan ICIJ, Ahmad Bakri Putra merupakan kader Golkar dan caleg Golkar Jateng, Whitlam tercatat punya offshore leask di ICIJ.

27. PT BINAMITRA SUMBERARTA
Pemilik saham: PT Tenaga Batu Kalimantan, PT Delta Ultima Coal **Komisaris:** Richan Simanjuntak SH, Martua Pahala Chandra Hutabarat **Direksi:** Punguan Parulian Vitus Marbun SH.

28. PT PERDANA MAJU UTAMA
Pemilik saham: Lusia Wongsosoehardjo, Fendy Tjia **Komisaris:** Tarsisius Tjongianto **Direksi:** Bedha C

41. PT KATIMEX JAYA
Pemilik saham: Hajjah Nani Oentarni Rustam Effendi, Adji Indra Djaya, Adji Arus Wiradjaya, Adji Mukti Atmadjaja **Komisaris:** Hajjah Nani Oentarni Rustam Effendi **Direksi:** Haji Adji Aria Widjaja, Adji Indra Djaya.

29. PT BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA
Pemilik saham: Tuty Kartika Maskiah Fatmawati, Libriani Dwi Arsanti, Khaidir, Fithresia Marcelina, Komjen (Pun) Nugroho Djayusman **Komisaris:** Tuty Kartika Maskiah Fatmawati, Libriani Dwi Arsanti **Direksi:** Laksamana TNI (Pun) Syamsul Bahri **Keterangan:** Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Nugroho Djayusman.

31. PT HARITA JAYA RAYA
Pemilik saham: Rita Indriawati, Lim Gunardi Hariyanto, PT Harita guna Dharma Bhakti, Doktor Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, Lim Gunawan Hariyanto **Komisaris:** Rita Indriawati, Doktor Lim Hariyanto Wijaya Sarwono **Direksi:** Lim Lisa Rita Indriawati, Lim Gunardi Hariyanto, Lim Gunawan Hariyanto **Keterangan:** Rita Indriawati punya perusahaan cangkang di ICIJ, Lim Gunardi Hariyanto is President Commissioner at Tirta Mahakam Resources Tbk PT, Lim Gunawan Hariyanto adalah pebisnis Indonesia di sektor sumber daya alam. Ia saat ini menjabat Presiden Direktur dan CEO Harita Group.

36. PT ADAS ABADI
Pemilik saham: Qurais Ismail **Direksi:** Qurais Ismail **Keterangan:** Qurais merupakan kader partai PKB, dan caleg DPRD Kabupaten Kukar.

30. PT BARAMULTI SUKSESSARANA
Pemilik saham: Henry Angkasa, PT Wahana Sentosa Cemerlang, Masyarakat, Tata Power International **Komisaris:** Daniel Suharya, Doddy Sumantyawan Hadidojo Soedaryo, Agus Gurlaya Kartasasmita, Ramesh Narayanswamy Subramanyam, Tengku Alwin Aziz, Kuntoro Mangunsubroto, Shweta Mathur, Suh Hong Hur **Direksi:** Eric Rahardja, Sanjay Dube, Adikin Basirun, Abhishek Singh Yadav, Ramanathan Vaidyanathan, Dong Ho Kang, Doddy Iman Hidayat **Keterangan:** Henry Angkasa is President Director at PT Antang Gunung Meratus, Irjen Pol Drs Dody Sumantyawan Hadidjo Soedarjo SH adalah seorang politikus dan pebisnis Indonesia serta mantan perwira tinggi Polri yang saat ini menjabat sebagai Komisaris, Dr Ir Kuntoro Mangkusubroto MEng adalah Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan sejak 22 Oktober 2009. Ia adalah mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia di era Kabinet Reformasi Pembangunan dan juga mantan Direktur Utama PLN tahun 2000 - 2001.

33. PT TRISENSA MINERAL UTAMA
Pemilik saham: PT Toba Bara Sejahtra, PT Toba Sejahtra **Komisaris:** Eddy Kustiwa Koesma, Elim Khiat **Direksi:** Ernald Lauddy Kamil, Teguh Alamsyah, Waracahya Dea Kanyaka, Suaidi Marasabessy (Dirut) **Keterangan:** Eddy Kustiwa, ketua tim Bravo 5 sebagai tim Pemenangan Jokowi & Ma'aruf Amin. pangkat terakhir Brigjen TNI (Purn), Letjen TNI Suaidi Marasabessy adalah seorang mantan perwira tinggi TNI AD dan juga politikus Indonesia.

37. PT INDOMAS KARYA JAYA
Pemilik saham: Paulus Muljadi **Komisaris:** Paulus Muljadi **Direksi:** Tommy Wibawa Setiadarma.

34. PT ADIMITTRA BARATAMA NUSANTARA
Pemilik saham: PT Toba Bara Sejahtra, PT Adimitra Nusantara Energi **Komisaris:** Dicky Yordan, Imelda The, Sintong Panjaitan **Direksi:** Hamid Awaluddin (dirut), Pandu Patria Sjahrir, Michael Soerijadji, Sudirdjo Widjaja **Keterangan:** Dicky Yordan di juga direktur di perusahaan toba bara sejahtra. ia juga punya perusahaan offshoreleaks, Letnan Jenderal TNI Sintong Hamonangan Panjaitan atau biasa dirujuk Sintong Panjaitan adalah seorang purnawirawan TNI lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1963.

39. PT KALTIM BATU MANUNGGAL
Pemilik saham: Sambudi Trikadibusana, Gunandi Trikadibusana **Komisaris:** Tidarta Trikadibusana **Direksi:** Sugiharto.

35. PT KUTAI ENERGI
Pemilik saham: Paulina Maria Dame Uli, PT Toba Sejahtra **Komisaris:** Davit Togar Pandjaitan, Ir Jusman Syafii Djamal **Direksi:** Elim Khiat, Suaidi Marasabessy, Hamid Awaluddin (dirut) **Keterangan:** Elim Khiat merupakan direktur keuangan di Toba Bara. David Togar merupakan anak dari Luhut Binsar Pandjaitan, Jusman mantan menteri perhubungan era Susilo Bambang Yudhoyono, hamid Awaluddin mantan Menkumham era Susilo Bambang Yudhoyono.

40. PT ITCI HUTANI MANUNGGAL
Pemilik saham: PT Inhutani I Persero, Equerry Company Limited **Komisaris:** Bandie Tjoe Kok, Supriyanto, Ir Sri Widodo **Direksi:** Ir Drs Arjadi Lego Pramono, Junior Lumbangaol, Arliah, Guntur (dirut).

42. PT ALAM JAYA PERSADA
Pemilik saham: PT Ganda Sawit Utama, PT Indigo Sawit Utama **Komisaris:** Riadi Didik Tjahjanto **Direksi:** Soemanto Sastro **Keterangan:** Riadi Didik juga direktur di Gama Plantations.

45. PT KALTIM BANGUN JAYA
Pemilik saham: PT Udinda Investama, PT Brasali Aneka Investasi, PT Kaltim Agung Sejati **Komisaris:** Ir Budi Brasali, Sutanto Joso, Vence Rumangkang **Direksi:** Andrew Kukkutahlie, Iwan Putra Brasali, Wiely Sugiharto, Djeradjat Yanto Joso **Keterangan:** Nama Iwan Putra Brasali juga tercatat di perusahaan cangkang di ICIJ Offshore leaks, Wiely namanya pernah terlibat pada korupsi rekomendasi kepada perusahaan milik Ketua DPR Agung Laksono, PT Kaltim Bhakti Sejahtera (PT KBS) untuk ikut membuka lahan perkebunan kelapa sawit, proyek sejuta hektar di era gubernur Kaltim Suwarna. Demikian juga Vencu Rumangkang.

46. PT KUTAI PERMATA NUSANTARA
Pemilik saham: PT Nusantara Multi Dinamika, Putu Eka Jaya, Dr Redy Asmara **Komisaris:** Ir Slamet Haryadi, Ir Yusuf Iskandar, Putu Eka Jaya **Direksi:** Ir Trijana Noegraha, Darwin Tamajaya **Keterangan:** Ir Slamet Riyadi juga Direktur Utama PT Mifa Bersaudara, Redy Asmara ketua Nasdem Balikpapan.

32. PT INTERNATIONAL TIMBER CORPORATION INDONESIA KARTIKA UTAMA
Luas: 173.395. **Komisaris:** Hashim Djojohadikusumo **Keterangan:** Hashim adik kandung dari Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan di Jokowi-Amin yang sebelumnya menjadi rivalnya.

51. PT WULANDARI BANGUN LESTARI
Pemilik saham: Christopher Sumasto Tjia, Clarissa Sumasto **Komisaris:** Clarissa Sumasto, Francisco Sumasto **Direksi:** Christopher Sumasto Tjia, Tjia Daniel Wirawan, Leonardus Sutarman, Agustinus.

52. PT ROYAL BORNEO PROPERTINDO
Pemilik saham: PT Bhakti Tamara, PT Nureka Bintang Abadi **Komisaris:** Freddysun **Direksi:** Ir Iwan Setiawan, Satria Ardiansyah.

53. PT KARUNIA WAHANANUSA
Pemilik saham: Achmad Asfia, Noval Asfihani, Nahdi Asfihani **Komisaris:** Noval Asfihani, Nahdi Asfihani **Direksi:** Achmad Asfia, Rudy Go **Keterangan:** Noval dan Nahdi diduga anak dan satu keluarga.

54. PT AVICA JAYA NUSANTARA
Pemilik saham: PT Sugico Graha, Suduri **Komisaris:** Angela Ningsih **Direksi:** Ferdiana Feridha Prihatiningsih **Keterangan:** Angela juga bermain di properti bersama Kokos Leo Lim.

55. PT INDO RIDLATAMA POWER
Pemilik saham: PT Indonesia Power, PT Ridlatama Bangun Mandiri **Komisaris:** Dody Sumantyawan HS, Hariyadi Krismiyanto **Direksi:** Ir Makmur Marzuki, Lukman Dahri, M Sudjilan **Keterangan:** Irjen Pol (Purn) Drs Dody Sumantyawan Hadidjojo Soedarjo SH, adalah seorang politikus dan pebisnis Indonesia, mantan Kapolda Jateng. Sudjilan juga menjabat di Deputy Manager Bidang Umum Indonesia Power PLTU Suralaya.

10. PT ARSARI TIRTA PRADANA
Pemilik saham: PT Arsari Enviro Industri, PT Arsari Pradana utama **Komisaris:** Daniel Frederik Poluan, Hasim Sujono Djojohadikusumo **Direksi:** Bambang Sjamsuridzal Atmadja, Mora Siregar, Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, Wilhelmus Theodorus Maria Smits **Keterangan:** Bambang selama ini menjalankan bisnis Prabowo dibawah naungan Hasim. Ia juga pemilik dan CEO PT Tidar Kerinci Agung, perusahaan kertas Prabowo yang gulung tikar.

38. PT ETAM MANUNGGAL JAYA
Pemilik saham: Gunandi Trikadibusana, Kaspul Anwar Yusran **Komisaris:** Kaspul Anwar Yusran, A Ibrahim Saleh **Direksi:** Hermanto **Keterangan:** A Ibrahim Saleh purn berpangkat Mayjen, Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Pangdam XII/Tanjungpura.

43. PT KUTAI INTI UTAMA
Pemilik saham: PT Kalpataru Investama, PT Green Energy Service (Netherland) **Komisaris:** Ir Burhanuddin, Ir Muhamad Ikbal Bey **Direksi:** Ir H Budi Mulia Rachmat, M Jamil Darus.

47. PT SINGLURUS PRATAMA
Pemilik saham: Lanna Resources Public Company, PT Ambharakarta Perdana, PT Harita Jayaraya, PT Indocoal Pratama Jaya **Komisaris:** Kraisi Sirirungsi, Petcharat Chayanon, Prasert Promdech, Saharat Vatanatumrak, Toto Iman Dewanto, Yocke Kaseger **Direksi:** Anun Louharanoo, Ludi Prasetyo Hartono, Panot Charoensuk, Sonny Susanto, Sudusit Ounsangchan, Srihasak Arirachakaran.

49. PT PANDEGA CITRA NIAGA
Pemilik modal: PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Inti Prima Serasi **Komisaris:** Dwiretno Tobing, Hajjah Siti Fatimah SE **Direksi:** H Noer Indradjaja, Lukas Masehi, Paul Christian Ariyanto **Keterangan:** Paul adalah direktur Podomoro land, di media ia membantah bahwa ada bocoran rencna Ibu kota baru, karena Podomor land langsung menjual properti di area Ibu kota baru

44. PR ARGO INDOMAS
Pemilik saham: Goodhope Asia Holding, PT Kawan Karya Gemilang, PT Citra Surya Mandiri, Shalimar Development Sendirian Berhard **Komisaris:** Amitha Saktha Amaratunga, Don Chandima Rajakaruna Guna Wardena, Hariharan Selvanathan, Israel Paulraj, Manoharan Selvanathan, Mavath Ramachandran, Tilak de Zoysa **Direksi:** Aneesh Dudeja, Bastian Coralalage Saliya Thusan Indika Rodrigo, Candauda Arachchige Vineetha Sanjaya Upasena, Christoforus Samp Pakadang, Edi Suhardi.

48. PT KARYA AGUNG CIPTA
Pemilik modal: Kokos Leo Lim, Angela Ningsih **Komisaris:** Angela Ningsih **Direksi:** Kokos Leo Lim **Keterangan:** Direktur Utama PT Tansri Madjid Energi (TME) Kokos Jiang alias Kokos Lio Lim.Kokos Lio Lim dan Khairil Wahyuni didakwa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan batu bara Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Muara Enim, Sumatra Selatan yang merugikan negara Rp477 miliar.

50. PT SENTRA GAYA MAKMUR
Pemegang saham: PT Pikko Land Development Tbk, PT Helindo Bangunraya Sejahtera **Komisaris:** Silvana, Sicilia Alexander Setiawan **Direksi:** Hendrik Hakim, Joewono Witjitro Wongsodiharjo, Steven Hakim, Nio Yantony **Keterangan:** Hendrik dan Setven punya rekam jejak buruk dalam mengelola perusahaan di Tarakan. Ia mempailitkan perusahaan untuk meraup keuntungan, Sicilia bekerja juga untuk Pikko Land, Joewono pemain lama di properti, ia juga di PT Bangun Artha.

perusahaan tersebut juga tercatat nama **Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono**, bendahara umum Partai Gerindra, ia adalah anak dari Bianti Djiwandono, kakak sulung Prabowo Subianto.

Temuan penting lain, terdapat nama-nama para purnawirawan jenderal kepolisian maupun militer di berbagai perusahaan yang berada di kawasan IKN, yakni Irjen. Pol. (Purn.) Drs. **Dody Sumantyawan Hadidojo Soedaryo**, S.H. Namanya tercatat sebagai komisaris PT. Indo Ridlatama Power.

Mayjen (purn) **A. Ibrahim Saleh** sebagai komisaris di perusahaan PT Etam Manunggal Jaya; Letjen TNI (purn) Suaidi Marasabessy, Letjen (purn) TNI Sintong Hamonangan Panjaitan, dan Brigjen (purn) Eddy Kustiwa Koesma yang ketiganya berada di jajaran petinggi PT. Toba Grup; Irjen Pol (purn) Drs. Dody Sumantyawan Hadidojo Soedaryo tercatat sebagai petinggi PT. Baramulti Suksesarana; Komjen (Purn) Nugroho Djayusman tercatat sebagai petinggi PT. Bintang Prima Energy Pratama; Laksamana TNI (purn) Syamsul Bahri tercatat sebagai petinggi PT. Bintang Prima Energy Pratama; Brigjen Pol (purn) dan Drs. Victor Edison Simanjuntak tercatat sebagai petinggi PT. Mandiri Sejahtera Energindo.

Data ICIJ menunjukkan salah satu pola kelicikan yang dilakukan pemilik saham dan direksi perusahaan tambang batu bara dan kebun sawit di proyek IKN adalah dengan memiliki perusahaan cangkang di negara surga pajak di British Virgin Island.

Dari penelusuran tersebut di atas, sejumlah politisi, purnawirawan jenderal polisi dan militer, para taipan properti, tambang, sawit, batu bara dan kayu diduga akan mendapatkan keuntungan besar dari mega proyek IKN. Terlebih situasi politik saat ini, hampir dipastikan tidak ada partai oposisi, sehingga pemerintah diduga kuat akan saling berbagi keuntungan.

Di sektor properti, PT. Agung Podomoro Grup melalui anak perusahaan PT. Pandega Citra Niaga yang sebelumnya telah mendapatkan izin lokasi reklamasi Pantai Balikpapan langsung gerak cepat melakukan pemasaran kaveling properti mewah pasca-pengumuman lokasi IKN oleh Presiden Jokowi. PT. Agung Podomoro tidak sendiri, ada 6 perusahaan properti lainnya yang mendapatkan izin serupa dari Pemerintah Kota Balikpapan yang akan mendulang untung dari rencana hadirnya mega proyek IKN. Di antaranya PT. Sentra Gaya Makmur, PT. Royal Borneo Propertindo, PT. Avica Jaya Nusantara, PT. Karunia Waha Nusa, PT. Karya Agung Cipta, dan PT. Wulandari Bangun Lestari.

Perusahaan properti PT. Karya Agung Cipta, sahamnya dimiliki oleh Kokos Leo Lim. Ia Direktur Utama PT. Tansri Madjid Energi (TME). **Kokos Leo Lim** dan **Khairil Wahyuni** memiliki jejak terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan batu bara Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Muara Enim, Sumatera Selatan yang merugikan negara Rp477 miliar. Kokos divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, **tetapi Kejaksaan Jakarta Selatan dalam proses Kasasi ke Mahkamah Agung.**

Tidak hanya tokoh nasional yang dekat dengan istana negara, nama lain pemilik konsesi tambang dari lokal diwakili oleh dinasti Rita Widyasari. Melalui perusahaan PT. Lembuswana Perkasa tercatat nama Hj. Dayang Kartini, ibu dari mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, sebagai pemilik saham di perusahaan ini. Dinasti politik ini acapkali berurusan dengan lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tahun 2018, Rita Widyasari dinyatakan bersalah oleh pengadilan Tipikor dan harus mengembalikan uang negara dalam kasus korupsi menyusul ayahnya Syaukani H.R. Bupati Kutai Kartanegara yang sebelumnya juga ditangkap KPK pada tahun 2007.

SKEMA 'PEMUTIHAN DOSA' KORPORASI?

Mantan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bambang Brodjonegoro membenarkan bahwa PT. ITCI Hutani Manunggal (IHM) milik Sukanto Tanoto, yang menjangkau hingga 6.000 hektar, akan digunakan untuk pembangunan tahap pertama ibu kota.[20] Beberapa kali dalam berbagai media, pemerintah menyatakan lahan itu milik negara dan bisa diambil kapan saja. Namun, dapatkah begitu saja pemegang izin rela untuk angkat kaki? Apa kompensasi atau ganti rugi yang akan didapat korporasi pemegang izin di sana?

Beda tipe pemilik atau pengguna lahan, beda pula nasibnya. **Sejauh ini, tampaknya korporasi punya**

20 detikFinance. 18 September 2019. Achmad Dwi Afriyadi. https://finance.detik.com/properti/d-4711795/kepala-bappenas-benarkan-lahan-ibu-kota-baru-dikuasai-sukanto-tanoto
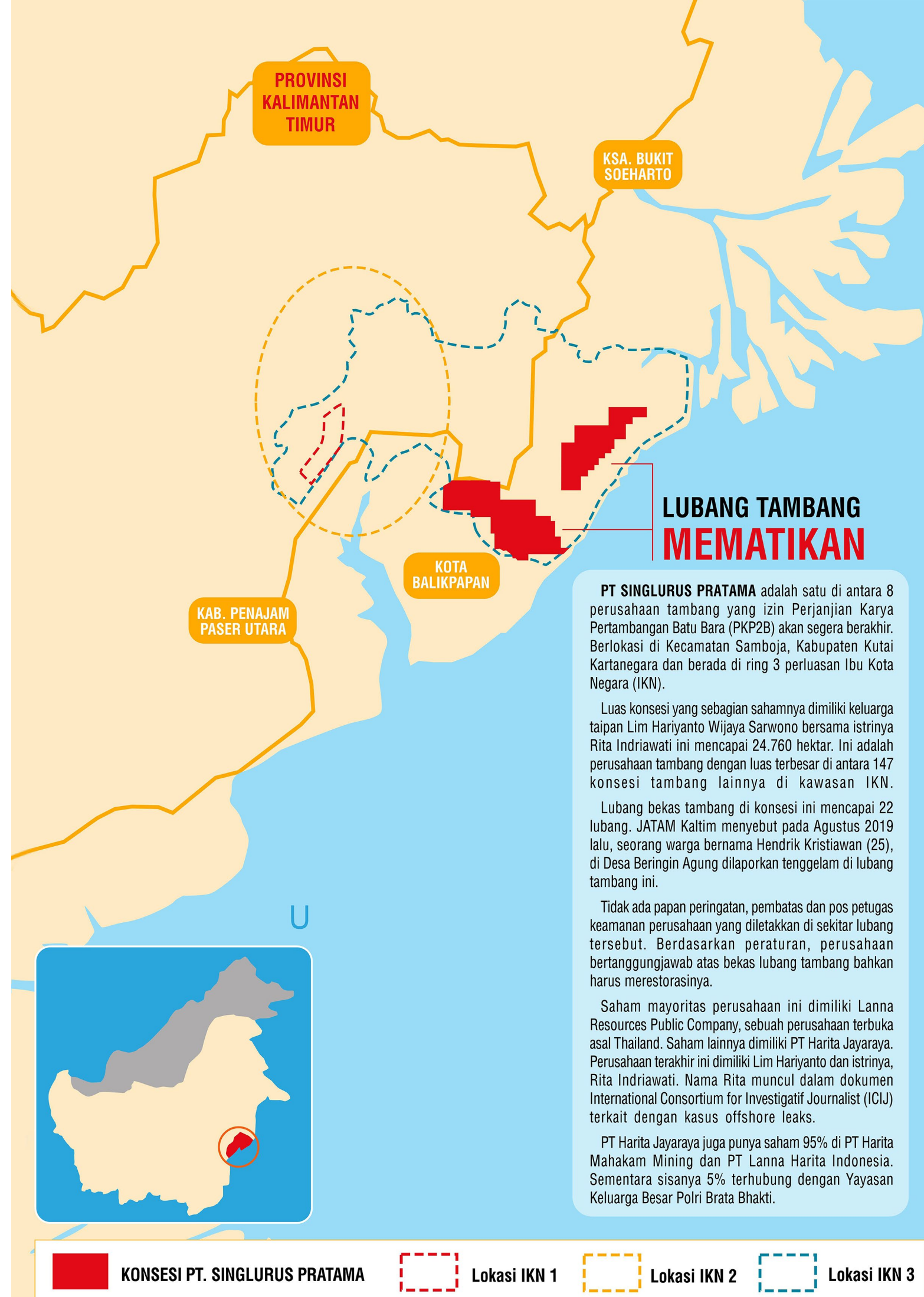
LEGALISASI PENGGUSURAN DAN POTENSI KORUPSI DI BALIK MEGA PROYEK IBU KOTA NEGARA

Pada seorang jurnalis media [21], seorang bapak dari Desa Semoi Dua yang berbatasan langsung dengan kawasan konsesi PT. IHM (konsesi yang direncanakan sebagai ibu kota baru), menyatakan tersanjung bila di dekat desanya akan dibangun istana negara. Namun, kebahagiaan itu mungkin akan pupus bila beliau tahu, setelah pasak-pasak beton ditanam, desa kecil itu bukan lagi rumahnya.

Desa Semoi Dua merupakan buah air mata generasi transmigran pada tahun 70-an [22], ketika transmigran dari Pulau Jawa menempuh jarak yang begitu jauh ke lokasi terpencil, hanya untuk menemukan perumahan yang dijanjikan pemerintah saat itu dalam kondisi tertutup penuh ilalang tinggi, bahkan atapnya pun tak tampak. Kehidupan betul-betul mereka mulai dari nol. Kemudian, beberapa dekade berlalu, komunitas transmigran berhasil bertahan hidup, berkeluarga, berkembang. Dikabarkan, pendataan atas tanah terakhir kali dilakukan oleh pemerintah tahun 1984. Bisa dibayangkan kini banyak keluarga yang tidak memiliki Surat Kepemilikan Tanah.

Berdasarkan Rancangan Undang-undang Pertanahan yang tengah disodorkan pemerintah ke DPR, jika tanah tidak bisa dibuktikan siapa pemiliknya, maka otomatis menjadi milik negara.[23] Hal ini merupakan praktik politik agraria zaman kolonial. RUU tersebut **mempersulit peluang penyelesaian konflik lahan** dan dikhawatirkan justru akan muncul peradilan pertanahan. Pengadilan pertanahan bersifat legalistik, hukum positif semata. Jika hal tersebut terjadi maka otomatis petani, masyarakat adat, buruh tani, yang menurut hukum positif itu ilegal, sulit memperoleh keadilan. RUU Pertanahan yang sedang diajukan saat ini, merupakan **ancaman kriminalisasi bagi masyarakat yang mempertahankan tanahnya dari penggusuran**.[24]

Sementara itu, revisi UU Minerba pada bagian penjelasan pasal 99 ayat 2 berpotensi menguntungkan dan menjadi modus pemutihan atau cuci dosa perusahaan pertambangan batu bara terkait kewajiban pemulihan oleh pemegang izin tambang di kawasan IKN. Dalam pasal ini, peruntukan lahan pasca-tambang dapat digunakan untuk irigasi dan objek wisata.

Pemerintah pun rentan untuk digugat jika melakukan pencabutan izin secara sepihak tanpa memberi kompensasi kepada pihak perusahaan. Bisa dibayangkan, negosiasi urusan IKN hanya terjadi antara pemerintah dan perusahaan tanpa melibatkan rakyat.

Kesan kuat bagi-bagi proyek dalam pemindahan ibu kota terjadi bersamaan dengan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kontroversi pemilihan komisioner baru maupun dengan revisi undang-undang KPK. Tanpa dibekali oleh kewenangan penuh untuk menyadap dan hilangnya independensi KPK, mustahil pengawasan dan pemberantasan korupsi dalam mega proyek dapat berjalan maksimal. ■

21 Detik, 22 September 2019. https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20190922/Menelisik-Episentrum-Calon-Ibu-Kota-Baru/

22 Detik. 22 September 2019. Op cit.

23 CNN Indonesia. 7 September 2019. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190907183852-32-428421/ruu-pertanahan-dinilai-memuat-belasan-pasal-bermasalah

24 CNN Indonesia. 7 September 2019. Op cit.

lebih banyak kesempatan bernegosiasi dengan pemerintah, ketimbang warga. Untuk warga desa, lokasi dan apa yang akan terjadi pada desa mereka terkait lokasi ibu kota baru, semua masih misteri dan rumor. Sempat hadir belasan pegawai dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dari **26 Agustus -11 September** ke beberapa desa di Sepaku yang berbatasan langsung dengan PT. IHM, tetapi tidak menceritakan detail tujuan kedatangan, hanya mendata kepemilikan lahan.[25] Kedatangan misterius pegawai-pegawai pemerintah tersebut adalah bentuk dari kejahatan informasi terhadap masyarakat terdampak.

Kontras dengan warga desa yang tengah bertanya-tanya, sudah ada pertemuan antara tiga pejabat Grup *Asia Pacific Resources International Holdings Ltd* (APRIL) di Kantor BAPPENAS.[26] **Korporasi punya kesempatan sejak dini untuk memastikan investasi mereka aman dan bersiasat dengan rencana hadirnya mega proyek Ibu Kota Negara**.

Sepanjang tahun 2018 saja, PT. IHM telah menikmati volume produksi **1,1 juta metrik** ton. Aset perusahaan kini berkisar Rp1,9 triliun, dan memasok bahan baku pembuatan kertas untuk anak perusahaan grup APRIL.[27] Bila kompensasi penggunaan lahan korporasi untuk Ibu Kota Negara siap dieksekusi, BAPPENAS akan menyerahkan skema penggantian investasi untuk kemudian ditangani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Banyak aspek yang akan dikalkulasi pemerintah untuk memberikan korporasi kepastian 'melanjutkan kehidupan' investasi mereka. Kompensasi dapat berkisar, memperhatikan masa panen sebelum melakukan pembukaan lahan, kompensasi per-tegakan pohon atau menyiapkan lahan pengganti.[28] Singkat kata, tampaknya korporasi tetap dapat meraup untung.

APA DAN BAGAIMANA PENDAPAT RAKYAT INDONESIA?

Wacana Ibu kota baru diusung dengan salah satu alasan bahwa bangsa ini ingin bergerak dari model pembangunan 'Jawa-sentris' ke 'Indonesia-sentris'. Namun sebaliknya, proses penetapan ibu kota baru itu sendiri justru terasa sentralistik ditentukan dari Jakarta terutama Jokowi. Dalam prosesnya disampaikan bahwa pemilihan lokasi mengerucut ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur. Pernyataan ini tanpa kajian terbuka yang dapat dipelajari publik. Hal ini berlanjut bahkan sampai pada pemilihan lokasi akhir di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.

Sudahkah keputusan publik ini diawali dengan menanyakan perasaan tuan rumah? Apa pendapat warga Kalimantan Timur? Apa saja kekhawatiran mereka dan bagaimana pula pendapat rakyat Indonesia lainnya?

KedaiKOPI menggelar survei pada 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Lembaga Survei KedaiKOPI menunjukkan sebanyak 39,8 persen responden tidak setuju dengan usulan tersebut. Sedangkan yang setuju sebesar 35,6 persen, dan 24,6 persen memilih untuk tidak beropini. Sebanyak 95,7 persen responden dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap mega proyek ibu kota. Survei lainnya dari Median yang dilakukan 26-30 Agustus 2019 [29], sebanyak 45,3 persen responden menolak mega proyek ibu kota, 40,7 persen responden menyetujui mega proyek ibu kota dan 14 persen responden mengaku tidak tahu.

Pengabaian partisipasi publik dalam keputusan penting ini sinonim dengan pelanggaran hak asasi warga negara dan jaminan konstitusional atas partisipasi tersebut. Korban sesungguhnya mungkin tak dimintai pendapat. Sulit terjangkau lembaga *polling* dan tidak viral di media sosial, sehingga seringkali mereka dianggap tak ada. Mereka adalah warga desa dan masyarakat adat, yang hidup di sela-sela konsesi tambang dan hutan yang telah dipotong-potong dan dibagi-bagi pada korporasi. Jangan salah, mereka bukan orang lemah. Mereka sudah berhasil mendefinisikan ketenangan hidup, bahkan sebelum negara hadir. Kini dengan wacana ibu kota baru, segala aspek hidup yang dengan susah payah mereka bangun terancam.

Bertolak belakang dengan para penguasa lahan skala besar, kebanyakan warga desa di Indonesia berada dalam posisi lemah. Mereka **tidak punya dokumen untuk menunjukkan kepemilikan lahan yang telah diwarisi dari nenek moyang mereka, sehingga mereka mudah terusir dari satu-satunya kampung halaman yang mereka kenali karena adanya proyek-proyek infrastruktur**.

KONFLIK DAN MASYARAKAT ADAT YANG AKAN TERSINGKIR

Masyarakat asli Kabupaten Penajam Paser Utara seperti Suku Balik yang berada di ring satu. Terdapat 150 keluarga Suku Balik yang tinggal di Kelurahan Pemaluan.[30] Pertanyaan besar bagi mereka saat ini adalah apa dampak mega proyek IKN pada hidup mereka.

Dahulu Suku Balik hidup makmur dengan sumber makanan berlimpah. Kemudian, mereka menghadapi **hantaman pertama pada tahun 60-an ketika perusahaan kayu masuk ke Kalimantan Timur. Sejak itu hidup warga mulai sulit**. Sebagian warga berpindah. Mereka dimiskinkan oleh keadaan, ikut arus perubahan kebiasaan termasuk harus tergantung pada produksi pangan baru. Secara perlahan mereka juga kehilangan sebagian budaya upacara karena terputusnya ikatan dengan alam. Begitu juga dengan gaya hidup saling berkumpul dan bercerita yang sudah diwariskan antargenerasi, berubah menjadi lebih individualis.

Pemerintah juga tidak mempertimbangkan **dampak perpindahan manusia dalam jumlah yang besar ke lokasi baru**. Mulai dari tekanan pada lingkungan, hingga kesenjangan ekonomi antara pendatang atau pegawai pemerintah dengan warga setempat seperti yang dikhawatirkan masyarakat Paser Balik.

Tersingkirnya Betawi dari kampungnya akibat pembangunan ibu kota negara di DKI Jakarta menyebabkan warga Betawi semakin tersingkir ke wilayah pinggiran. Apa yang dialami masyarakat Betawi dikhawatirkan juga akan dialami komunitas asli Paser Balik. Ibu kota baru dapat menjadi hantaman kedua bagi kelangsungan kehidupan komunitas mereka. Di wilayah inti kawasan Ibu Kota Negara ada 5 desa yang di antaranya dihuni komunitas ini.

SASARAN EMPUK SPEKULAN TANAH?

Lingkungan di Kalimantan Timur sudah rusak oleh industri ekstraktif. Kerusakan ini akan ditambah dengan replikasi tekanan beban lingkungan ibu kota seperti yang sudah dialami Jakarta. Alih-alih memulihkan Jakarta, pemerintah justru akan menciptakan kerusakan serupa di tempat baru.

Sebagaimana yang kita ketahui, sekarang pun Kalimantan memiliki tragedi lingkungannya sendiri. **Hutan sebagai ruang hidup satwa, saat ini sudah menyempit, terdesak oleh industri kayu, tambang, sawit serta kebakaran lahan dan hutan. Ditambah lagi ruang hidup satwa harus bersaing dengan sebuah kota baru yang akan terus berkembang** dan meluas dengan area penyokong.

Bambang Brodjonegoro ketika menjabat sebagai Kepala BAPPENAS memastikan spekulasi harga tanah tidak akan terjadi, karena lokasi untuk ibu kota baru sudah menjadi milik atau dikuasai negara.[31] Sehingga bila ada pembebasan lahan, akan sangat minim spekulasi. Pemerintah menjanjikan untuk melakukan *"land freezing"* [32] atas harga tanah segera setelah dilakukan penetapan lokasi agar tidak terjadi spekulasi.[33]

25 Detik. 22 September 2019. Op cit.

26 Tempo. 14 September 2019. Putri Adityowati. https://majalah.tempo.co/read/158412/hutan-tanoto-di-ibu-kota

27 Tempo. 14 September 2019. Op cit.

28 Koran Tempo. 19 September 2019. Bisnis Section : Calon Ibu Kota di Konsesi Tanoto & Ganti Rugi Tegakan Pohon Jadi Opsi Terakhir.

29 Kompas.com. 3 September 2019. Ardhito Ramadhan. https://nasional.kompas.com/read/2019/09/03/13401871/survei-median-453-persen-responden-tak-setuju-ibu-kota-pindah.

30 Sidney Morning Herald. 15 September 2109. James Massola, Amilia Rosa dan Karuni Rompies. https://www.smh.com.au/world/asia/the-tribe-in-the-path-of-indonesia-s-almost-impossible-new-capital-20190912-p52qu9.html

31 Kompas.com, 20 Agustus 2019. Yoga Sukmana. https://money.kompas.com/read/2019/08/20/203200926/jadi-spekulan-tanah-di-lokasi-calon-ibu-kota-baru-pasti-rugi-kenapa-

32 Suara.com. 28 Aug 2019. Fabiola Fabrianti https://www.suara.com/news/2019/08/28/100041/antisipasi-spekulasi-tanah-di-kaltim-atrbpn-akan-lakukan-land-freezing

33 CNBC Indonesia.com. 19 September 2019. Monica Wareza. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190918102307-4-100244/insider-trading-ri-bakal-larang-pejabat-spekulasi-tanah

MODUS TUKAR GULING DAN POTENSI PERMASALAHANNYA

Jika melihat kembali calon wilayah ibu kota baru ini, praktis ada beberapa skema tukar guling yang akan terjadi. Tentunya juga dengan potensi-potensi permasalahan yang akan timbul jika kita bercermin dengan kasus-kasus di wilayah lainnya.

TUKAR GULING KAWASAN HUTAN

Dalam konteks kaitannya dengan rencana ibu kota baru, tukar menukar kawasan hutan dapat terjadi pada calon areal ibu kota dengan status hutan produksi yang belum dibebani oleh izin pemanfaatan. Merujuk peraturan yang ada, Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan Kawasan Hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan Kawasan Hutan dan/atau Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang produktif menjadi kawasan Hutan Tetap. Tukar menukar kawasan hutan merupakan mekanisme yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015. Peraturan ini menggantikan PP sebelumnya nomor 60 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Adapun prasyarat dari tukar menukar kawasan hutan ini antara lain:

- Letak, luas, dan batas lahan pengganti yang jelas;
- Terletak dalam DAS, provinsi, atau pulau yang sama;
- Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional kecuali yang berasal dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang masih produktif;
- Tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan;
- Mendapat pertimbangan dari gubernur tentang informasi lahan pengganti.

Tukar menukar kawasan hutan merupakan salah satu dari sekian banyak titik potensi korupsi yang ada di sektor sumber daya alam. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus tukar menukar kawasan hutan di Jonggol, Jawa Barat. PT. Bukit Jonggol Asri menyuap Bupati Kabupaten Bogor saat itu agar dapat mengeluarkan surat rekomendasi tukar menukar kawasan hutan.

Kasus lain terkait tukar menukar kawasan hutan juga menimbulkan permasalahan konflik sosial yang berkepanjangan. Konflik terjadi pada areal yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan ataupun pada wilayah yang akan dijadikan sebagai lahan pengganti. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Areal PT. Semen Indonesia yang berada di Kabupaten Rembang sebelumnya berada di dalam kawasan hutan. Konflik antara masyarakat Samin dan PT. Semen Indonesia sampai saat ini masih menemui jalan buntu, walau berbagai macam upaya telah dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan dari berbagai kalangan. Bahkan, tatap muka dengan Presiden pun sudah beberapa kali dilakukan.

Sama halnya dengan masyarakat yang berada di Rembang, masyarakat di Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dikriminalisasi sebagai imbas dari izin PT. Semen Indonesia. Padahal mereka tidak berada di areal izin perusahaan tersebut. Nur Aziz, Mujiono, Sutrisno Rusmin dan ratusan warga lainnya yang sehari-hari menggarap lahan tak pernah menyangka tukar guling lahan hutan untuk pertambangan PT. Semen Indonesia di Rembang berbuntut pengambilan lahan pertanian yang sudah mereka kerjakan sejak 1972. Kriminalisasi tersebut berawal saat lahan garapan mereka secara sepihak ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui SK Menhut No: SK.0321/Menhut-VII/KUH/2014, tertanggal 17 April 2014 sebagai objek lahan pengganti (tukar guling) kawasan hutan yang dipakai PT. Semen Indonesia di Rembang untuk pabrik semen.

Dua konflik sosial dengan satu penyebab yang sama (tukar menukar kawasan hutan) di atas memperlihatkan bahwa dua wilayah tersebut tidak dalam status *Clean and Clear*. Padahal, dalam regulasi yang mengatur proses tersebut jelas menyatakan bahwa areal yang akan ditukarkan ataupun areal pengganti tidak berada dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan. Namun, contoh di atas justru memperlihatkan bahwa tukar menukar kawasan hutan justru membuat konflik semakin besar bahkan menimbulkan konflik baru.

Selain dua contoh di atas, tukar menukar kawasan hutan juga kerap dilakukan sebagai bentuk pemutihan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan hutan. Bahkan peraturan pemerintah terbaru yang mengatur proses tukar menukar kawasan hutan jelas bertujuan untuk memutihkan keterlanjuran izin-izin perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Dalam PP No.104 tahun 2015 pasal 51 khusus mengatur soal investasi keterlanjuran, antara lain perusahaan bisa mengajukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan. Kalau kebun berada di kawasan konservasi atau lindung, maka tetap dapat melanjutkan usaha selama satu daur tanaman pokok. Hal ini memperlihatkan semakin tumpulnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan hutan .

TUKAR GULING TERHADAP AREAL-AREAL YANG TELAH DIBEBANI IZIN

Dari hasil analisis prediksi calon ibu kota baru memperlihatkan bahwa calon lokasi tersebut sebagian besar telah dikuasai oleh izin-izin korporasi, baik itu di sektor kehutanan, pertanian, ataupun pertambangan. Kondisi ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait bagaimana skema untuk pembebasan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh korporasi tersebut.

Salah satu contoh kebijakan dengan kasus yang terjadi pada kebijakan tentang pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Pada 2016 pemerintah telah mengeluarkan PP No. 57 Tahun 2016 dan juga peraturan turunannya dalam bentuk PermenLHK No. 40 Tahun 2017. Dampak turunan dari kebijakan ini salah satunya penetapan areal prioritas restorasi gambut. Setidaknya, ada 2,1 juta hektar areal prioritas lahan gambut yang harus direstorasi. Termasuk juga areal gambut yang di atasnya telah dibebani oleh izin-izin korporasi. Untuk areal-areal gambut yang telah terbebani oleh izin, pemerintah mengalokasikan wilayah kawasan hutan yang tidak berizin di lokasi lain sebagai areal pengganti. Namun, yang patut menjadi perhatian besar adalah tidak adanya transparansi dan juga ruang partisipasi publik terkait kebijakan tersebut. Sampai saat ini pun, di mana lokasi areal yang disiapkan sebagai lahan pengganti masih menjadi pertanyaan. Keterbukaan informasi terkait wilayah-wilayah tersebut harus dilakukan mengingat lokasi yang menjadi areal pengganti akan terdampak: memunculkan konflik sosial baru ataupun deforestasi jika wilayah penggantinya masih tertutup oleh hutan alam. Potensi seperti ini sangat berpeluang terjadi dalam kasus ibu kota baru mengingat banyaknya izin-izin korporasi yang berada di wilayah tersebut.

TUKAR GULING TERHADAP AREAL-AREAL YANG TELAH DIBEBANI HAK MILIK ATAS TANAH

Pada dasarnya, tukar menukar kawasan hutan harus tetap menghormati hak atas tanah yang sudah ada. Tukar guling terhadap areal-areal yang telah dikuasai oleh masyarakat justru sering sekali menimbulkan konflik sosial. Seperti penggusuran, pengganti yang tidak adil, dan kesewenang-wenangan yang mengatasnamakan pembangunan. Berbeda jika wilayah yang akan ditukarkan, dikuasai oleh korporasi. Jika mengambil contoh peraturan tentang pengelolaan lahan gambut yang sudah dipaparkan di atas, terlihat pelayanan lahan pengganti untuk korporasi seakan diistimewakan. Bahkan, perangkat hukumnya disiapkan sehingga memiliki kepastian hukum yang jelas. ■

Namun, aksi spekulasi jual beli tanah, terkait mega proyek ibu kota baru justru marak[34] terjadi, termasuk di laman jual beli daring.

Direktur Agung Podomoro Land (APLN) Agung Wirajaya mengatakan bahwa rencana mega proyek IKN adalah berkah bagi bisnis properti mereka. Bahkan, iklan properti Borneo Bay City milik APL ini viral di media sosial karena memajang iklannya di harian Kompas hanya berselang sehari sejak diumumkannya mega proyek IKN oleh Presiden. "Ini berkah buat kami. Rencana mega proyek ibu kota ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang relatif berdekatan dengan lokasi Borneo Bay City ternyata makin meningkatkan minat masyarakat terhadap properti kami di sini," ujar Agung.[35]

Pemerintah mungkin menjanjikan spekulan tidak dapat memperjualbelikan tanah yang akan pemerintah kunci sebagai ibu kota baru. Namun, **lokasi yang bisa jadi spekulasi adalah wilayah sekitarnya**. Ancaman kenaikan harga tanah berlipat-lipat yang akan menyusahkan masyarakat dalam membeli perumahan sangat mungkin terjadi.[36]

Di sisi lain, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor menyatakan bahwa akan ada pemindahan warga dengan ekspektasi kompensasi harga lebih murah karena tanah tersebut milik negara.[37] Pada situasi inilah warga desa justru rentan terhadap penggusuran dari kampung halaman mereka sendiri. Hal serupa yang akan terjadi pada masyarakat di wilayah penyangga ibu kota baru, ketika pihak-pihak dengan modal besar dapat mengambil *margin* dari jual beli tanah. Di lain pihak, banyak dari warga desa di Kalimantan Timur tidak memiliki sertifikat tanah. Mereka tinggal di hutan atau di desa secara turun temurun dan tanah inilah satu-satunya lahan yang mereka miliki. ***Berpindah*, artinya memaksa mereka memulai hidup baru tanpa cukup uang dan sumber daya; *dan* memecah mereka dari jaringan sosial yang selama ini membuat mereka berdaya dan bertahan hidup.**

"Kami terbiasa hidup kekeluargaan, kami tak ingin hidup dengan mental perkotaan. Kalau saya tak punya kopi atau gula, saya tinggal pergi ke rumah tetangga. Kami khawatir mentalitas perkotaan akan menguasai hidup kami." —Jubaen, Suku Balik, Kalimantan Timur, dikutip dan ditranslasi ulang dari media SMH.[38]

ALASAN YANG DIBUAT-BUAT UNTUK MEGA PROYEK IBU KOTA

Pemerintah melempar isu atau keputusan perpindahan ibu kota ke publik, dan kemudian ramai dengan diskusi, asumsi dan kegaduhan. Sayangnya, pada saat yang sama, pemerintah tidak memaparkan rincian data, sehingga tercipta pula kebingungan. Dalam reportase berbagai media, kita dengar berulang kali pemerintah berlindung di balik kata "masih dalam kajian", sehingga tokoh dan organisasi masyarakat juga terpaksa memberikan pendapat bermodalkan potongan-potongan informasi yang minim.

Pemerintah lewat Kepala BAPPENAS mengklaim bahwa ibu kota baru akan menjadi kota yang ideal, dengan minimum 50 persen ruang terbuka hijau, terintegrasi dengan lanskap alami seperti sungai dan bukit. **Konsep *forest city* berulang kali disebut. Namun, rencana ini belum dibagikan pada tim ahli dan pegiat lingkungan hingga belum jelas bagaimana pemerintah berencana membangun hunian perkotaan tersebut tanpa mengganggu ekosistem setempat.**[39] **Yang sudah terjadi adalah proyek skala besar di Kalimantan, membuat hutan tempat hidup satwa terfragmentasi, termasuk menghilangkan koridor-koridor yang vital bagi satwa**.[40]

34 Beritagar.id. Muhammad Nur Rochmi. 22 agustus 2019. https://beritagar.id/artikel/berita/kenapa-samboja-jadi-ajang-spekulasi-jual-beli-tanah

35 https://ekonomi.bisnis.com/read/20190902/47/1143351/hasil-promosi-borneo-bay-city-kantongi-rp20-miliar

36 Tirto.id. Selfie Miftahul Jannah - 30 April 2019. https://tirto.id/mafia-tanah-dikhawatirkan-kerek-harga-lahan-di-lokasi-ibu-kota-baru-dnpk https://ekonomi.bisnis.com/read/20190827/47/1141384/pemerintah-perlu-segera-minimalisasi-spekulasi-tanah-di-ibu-kota-baru

37 Liputan6. Lizsa Egeham. 26 Agustus 2019. https://www.liputan6.com/news/read/4047540/gubernur-kaltim-siapkan-pergub-cegah-spekulan-tanah-di-lokasi-ibu-kota-baru

38 Sidney Morning Herald. 15 September 2109. James Massola, Amilia Rosa dan Karuni Rompies. https://www.smh.com.au/world/asia/the-tribe-in-the-path-of-indonesia-s-almost-impossible-new-capital-20190912-p52qu9.html

39 Mongabay. 2 Agustus 2019. Basten Gokkon. https://news.mongabay.com/2019/08/red-flags-as-indonesia-eyes-relocating-its-capital-city-to-borneo/

Berikut kami ulas beberapa asumsi yang menjadi perbincangan masyarakat, terkait lingkungan, tata kelola dan pertumbuhan kota agar kita tetap waspada mengawal isu terkait pembangunan ibu kota baru.

LINGKUNGAN HIDUP

Kata Pemerintah:
Perpindahan ibu kota menyelamatkan ekologi Pulau Jawa.[41]

Realitas:
Hancurnya ekologi di Pulau Jawa disebabkan karena tidak ada tata kelola yang baik dan tidak ada penegakan hukum yang kuat terhadap perusak lingkungan. Habisnya hutan di Pulau Jawa, kepunahan spesies, erosi, limbah pabrik, gundukan sampah plastik hanya dapat diselesaikan dengan kepatuhan pada hukum. Tidak ada kaitan logis antara proteksi lingkungan dengan memindahkan kantor pemerintahan ke pulau lainnya. Menyelamatkan ekologi Pulau Jawa harus dengan tindakan bukan ditinggalkan. Bila pemerintah tidak memiliki pemahaman ini, maka **kehancuran ekologis di Pulau Jawa hanya akan diekspor ke Pulau Kalimantan, yang saat ini juga sudah tertekan praktik industri kayu, sawit dan tambang.**

Kata Pemerintah:
Kalimantan relatif aman dari bencana gempa.

Realitas:
Kalimantan punya sejarah dengan berbagai bentuk bencana termasuk gempa dan kebakaran hutan.

Widjo Kongko, Ketua Bidang Mitigasi Bencana Persatuan Insinyur Indonesia mengatakan, tiga kecamatan di lokasi Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur, sepanjang 40 kilometer pantainya menghadap Selat Makasar dengan **potensi Smong Megathrust Sulut dengan ancaman tsunami kecil-sedang**. Hal lain, smong nontektonik yakni dari longsor juga perlu diperhitungkan. Sehingga kajian detail lindu-smong untuk pesisir Kalimantan Timur perlu dilakukan dari sumber Megathrust Sulut, Backarc Bali, dan sesar atau potensi longsor dasar laut curam Selat Makassar.

"Berdasarkan kajian hipotesis, potensi risiko dari gempa dan tsunami merupakan dampak dari wilayah lain, seperti dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan," kata Widjo Kongko.

Kalimantan Timur juga tidak bebas dari gempa bumi dan tsunami. Pada tanggal 20 November 2009 terjadi gempa 4.7 skala richter dan gempa yang terbaru terjadi pula di Kabupaten Paser, kabupaten yang sama, dengan 4.1 skala richter.[42] Gempa tersebut terjadi pada 20 Mei 2019, atau sebulan sebelum pengumuman pemindahan Ibu kota. Kabupaten Paser adalah kabupaten yang bersebelahan dengan Kabupaten PPU, lokasi ibu kota baru.

Sementara itu, potensi dari tsunami yang disebabkan longsoran bawah laut, ada tiga titik sesar yakni Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternostes, yang berpotensi di wilayah Selat Makassar.[43] **Namun, hingga kini belum ada kajian detail tentang mitigasi bencana di lokasi Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur.**

Pembabatan hutan di hulu dan sedimentasi sungai akibat aktivitas penambangan telah membuat sebagian daratan Kalimantan mengalami degradasi seperti semakin kering dan gersang hingga terancam berubah menjadi gurun pasir di satu sisi dan sisi lainnya langganan banjir.

Bahkan saat ini, ketika kita kembali menghadapi bencana kabut asap, **lokasi calon ibu kota baru sudah terkena paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan**. Luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6.715. Per September 2019, ada 1.106 titik panas api.[44] Laporan BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara

40 Mohammed Alamgir, Mason Campbell, Sean Sloan, Ali Suhardiman, Jatna Surpiatna and William F. Laurance. 2019. "High-risk infrastructure projects pose imminent threats to forests in Indonesia Borneo." Scientific Reports, vol. 9, no. 140.

41 https://nasional.tempo.co/read/889645/mensesneg-sebut-pemindahan-ibu-kota-demi-ekologi-jakarta

42 Detik.com. Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-4678277/bmkg-ungkap-catatan-sejarah-dan-potensi-gempa-tsunami-di-kaltim

43 https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/24/155553865/bmkg-ungkap-adanya-3-sesar-sumber-gempa-di-kalimantan-timur?page=all

44 Data Walhi Kalimantan Timur, tentang titik api di Kalimantan Timur.

[PPU], menyatakan beberapa daerah di PPU yang merupakan wilayah ibu kota negara baru, tak lepas dari kebakaran dan bencana asap. Titik lokasi di Nenang, Gunung Seteleng, dan Lawe-Lawe.[45]

Per-September 2019, terdapat 346 titik panas di Kalimantan Barat, 281 titik di Kalimantan Tengah, dan 105 titik di Kalimantan Selatan. Tidak saja mendapatkan asap berhembus dari provinsi lainnya, lokasi baru ini juga mengalami kebakaran. Kepala Sub-bidang Logistik dan Peralatan BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, Nurlaila, menyampaikan bahwa sedikitnya ada 18 kebakaran lahan di wilayahnya. Pemerintah, Kepala BAPPENAS, menyadari hal tersebut dan menyatakan akan mempersiapkan rencana mitigasi. Sepertinya pemerintah terpaksa menganggap hal ini lumrah, karena toh Singapura dan Malaysia pun sama-sama menghirup kabut asap yang lewat.[46] Ini argumentasi yang janggal karena negara-negara tetangga kita tak pernah memilih berada di posisi lintasan kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia yang sudah terbukti tak mampu kita atasi selama bertahun-tahun.

ENERGI

Kata Pemerintah:

Ibu kota baru tidak akan mengulang pilihan buruk energi pulau Jawa. Dalam pidatonya di depan rapat paripurna pembukaan sidang DPR Presiden Jokowi menyampaikan bahwa: "... Ibu kota baru akan dirancang modern *smart and green city* dengan suplai Energi Terbarukan tidak bergantung pada energi fosil ... ".[47]

Realitas 1:

Pembangkit listrik dari sumber energi kotor batu bara terus dibangun di Kalimantan, terutama Kalimantan Timur.

Pemerintah mengklaim meningkatkan komitmen pada Energi Terbarukan (EBT), tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan komitmen pada energi fosil. Dua pilihan energi ini bertentangan. Sulit bagi energi terbarukan yang adil untuk menjadi pilihan, bila pemerintah terus menerus memberikan ruang lebih banyak untuk energi kotor.

Bukti keberpihakan pemerintah terhadap energi kotor batu bara salah satunya dengan terus bertambahnya jumlah penggunaan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Setiap tahun jumlah DMO *(Domestic Market Obligation)* kian bertambah. Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 berturut-turut adalah 76 juta ton, 86 juta ton, 91 juta ton, 97 juta ton dan 115 juta ton.

Begitu juga dengan penggunaan energi kotor batu bara di Kalimantan. **Terdapat 2 PLTU batu bara di dekat Balikpapan dan Samarinda, yang tidak jauh dari lokasi ibu kota baru. Di Kalimantan, terdapat tujuh rencana pembangunan yakni Kalselteng 3, Kalselteng 4, Kalselteng 5, Kaltim 3, Kaltim 5, dan Kaltim 6 dengan kapasitas masing-masing 200 MW juga Kaltimra sebesar 400 MW.**

Sementara itu, untuk kebutuhan pasokan listrik ibu kota baru di Kalimantan Timur, dibutuhkan pasokan listrik sebesar 1.555 megawatt untuk kebutuhan 1,5 juta penduduk baru di ibu kota. Dengan target rampung 2024, maka pilihan tercepatnya adalah bersandar pada energi fosil, salah satunya energi kotor batu bara, penyebab masalah yang sama dengan polusi di ibu kota DKI Jakarta.

Pemain besar batu bara melihat ini adalah sebuah peluang untuk mendulang keuntungan. Dileep Srivastava, Direktur dan *Corporate Secretary* BUMI, mengatakan Kalimantan Timur akan membutuhkan lebih banyak energi setelah ibu kota pindah dari Jakarta. "Kami dapat memasok batu bara ke pembangkit listrik atau bahkan membangun pembangkit listrik untuk mereka".[48]

Mega proyek Ibu Kota Negara juga akan menguntungkan perusahaan PT Bumi Resources, Tbk. (BUMI), melalui anak perusahaan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang berencana membangun pembangkit listrik baru, sejalan dengan pemindahan ibu kota baru RI ke Kalimantan Timur. PT. KPC memiliki tambang batu bara di daerah Sangatta, berjarak 170 kilometer (km) dari Samarinda atau sekitar 260 km dari wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru.[49]

45 Mongabay.co.id, Diakses dari link https://www.mongabay.co.id/2019/09/24/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kalimantan-timur-nasib-ibu-kota-negara

46 Koran Tempo. 19 September 2019. Wilayah Calon Ibu Kota juga Terbakar. Hal. 22

47 Vivanews. 16 Agustus 2019. Raden Jihad Akbar. https://www.vivanews.com/bisnis/ekonomi/1723-jokowi-ibu-kota-baru-ri-tak-bergantung-pada-energi-fosil

48 https://www.cnbcindonesia.com/market/20190830162033-17-96031/sambut-ibu-kota-baru-bumi-bangun-pltu-di-kaltim

49 CNBCIndonesia.com. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/market/20190830162033-17-96031/sambut-ibu-kota-baru-bumi-bangun-pltu-di-kaltim

PETA LOKASI PLTU KALIMANTAN TIMUR

KETERANGAN

- KOTA
- MUARA JAWA
- SAMBOJA
- SEPAKU
- BATAS PROVINSI
- BATAS WILAYAH

 PLTU YANG SUDAH BEROPERASI

 PLTU YANG BELUM BEROPERASI

Bukan hanya PT. KPC, perusahaan lain yang akan diuntungkan misalnya PLTU PT. Indo Ridlatama Power. Pembangkit berkapasitas 2x17,5 megawatt tersebut berlokasi di Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Salah satu pemilik sahamnya PT. Indonesia Power, anak perusahaan PLN Persero. Pendirian pembangkit tersebut juga punya banyak masalah. Salah satunya dugaan kuat korupsi pembebasan lahan, diindikasikan kerugian keuangan negara mencapai Rp 3,7 miliar. [50] Perusahaan tersebut juga melakukan suap dalam perizinan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), yang disebutkan dalam putusan majelis hakim dalam kasus korupsi Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.[51]

Realitas 2:

Ibu kota baru berisiko mengulang masalah polusi udara yang sama dengan Jakarta.

Pemerintah tidak bisa mengisolasi kondisi lingkungan di dalam ibu kota baru, tanpa memperhatikan kebijakan energi dan lingkungan di seluruh Kalimantan, bahkan Indonesia, karena isu lingkungan bersifat lintas batas. **Polusi asap dan udara bersifat lintas batas. Ibu kota baru tetap akan terpapar polusi udara dari kebakaran hutan di Kalimantan dan polusi PLTU-PLTU batu bara yang sudah dan akan dibangun yang tersebar di Kalimantan** *(lihat Realitas 1 pada poin di atas).* Diketahui bahwa emisi PLTU batu bara mengeluarkan polutan mono-nitrogen oksida (NOx), sulfur dioksida (SO2), dan lebih berbahaya lagi PM2,5.

PM 2.5 adalah partikel halus yang dapat menyebar di wilayah yang luas, terbawa angin hingga ratusan kilometer dari lokasi PLTU batu bara [52], ke area perkotaan, perumahan, masuk ke pembuluh darah manusia sehingga menyebabkan **meningkatnya risiko kematian dini *(premature death)***, berbagai penyakit pernapasan serius seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), stroke, penyakit kardiovaskular, dan penyakit jantung.[53]

Artinya, alasan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur untuk menghindari polusi udara di Jakarta (yang sudah terkepung PLTU)[54] tak cukup. Faktanya, ibu kota baru juga akan terdampak polusi dari energi kotor PLTU batu bara, bahkan akan memicu pembangunan pembangkit batu bara baru.

ANCAMAN PADA BENTANG INFRASTRUKTUR EKOLOGIS TELUK BALIKPAPAN

Kehadiran IKN akan mengakibatkan **perampasan ruang hidup masyarakat pesisir dan nelayan tradisional** di dua wilayah yakni nelayan tradisional Kabupaten PPU dan nelayan tradisional Kota Balikpapan. Lebih dari 10 ribu [55] nelayan yang menggantungkan ekonominya pada sumber daya kelautan dan perikanan khususnya di Teluk Balikpapan.

Hulu Teluk Balikpapan turut tercakup dalam wilayah IKN atau ring dua yang mengancam keberadaan ekosistem mangrove. Ekosistem ini membentang sepanjang 17 km dari Kecamatan Balikpapan Barat hingga pesisir teluk di wilayah Kecamatan Penajam. Total luasan hutan mangrove mencapai 12.418,75 hektar [56] yang memanjang dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Somber wilayah administrasi Kota Balikpapan mengelilingi lekuk tubuh ekosistem Teluk Balikpapan hingga kemudian membentang hingga DAS Riko di wilayah administrasi Kabupaten PPU.

50 Diakses dari https://eksplorasi.id/pt-indo-ridlatama-diduga-lakukan-korupsi-pembebasan-lahan-pltu-muara-jawa/7957

51 Salinan tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Kukar Rita Widyasari.

52 Greenpeace SEA Indonesia. Airpocalypse - Bukanlah masa depan yang kita inginkan. 7 Agustus 2016

53 Greenpeace SEA Indonesia. Laporan : Pembunuhan senyap di Jakarta. October 2017

54 Greenpeace SEA Indonesia. Oct 2017. Op. Cit.

55 Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), 2019

56 Temuan FWI, 2018

Manfaat mangrove bagi layanan fungsi alam sekitar dan bagi ekonomi masyarakat serta habitat di Teluk Balikpapan antara lain perannya yang penting untuk sektor perikanan, sumber makanan dan pusat pertumbuhan berbagai jenis ikan, udang dan kepiting. Lebih lanjut lagi kotoran daun mangrove adalah salah satu pasokan pakan terbesar dalam rantai makanan di ekosistem pantai. Hal lainnya, mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon terbesar dibandingkan hutan daratan. Tidak hanya itu, mangrove juga melindungi wilayah pesisir dari erosi, sedimentasi dan badai maupun tsunami.

IBU KOTA BARU - UANG SIAPA?

Presiden Jokowi mengungkapkan total kebutuhan dana untuk membangun ibu kota baru yakni sebesar Rp466 triliun. Pertanyaan besar yang diperdebatkan di berbagai media adalah dari mana sumber uangnya?

Mei 2019, Kepala BAPPENAS Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan bahwa porsi pembiayaan akan dibagi menjadi tiga. Ketiganya, yakni pembiayaan dengan dana milik pemerintah lewat APBN sebesar Rp30,6 triliun, BUMN lewat KPBU sebesar Rp340,6 triliun dan swasta lewat skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebesar Rp95 triliun.[57] Bambang menjelaskan, terkait dana dengan APBN ini jika dinominalkan jumlahnya tergolong tak terlalu banyak dan bukan merupakan anggaran satu tahun tetapi dibagi 5 tahun.[58]

Cukup banyak kritik dilontarkan para ahli terkait sepenggal informasi yang BAPPENAS sampaikan tentang rencana pembiayaan. Pertama, tuntutan untuk transparansi lebih jauh, dari mana uang untuk membangun ibu kota baru. Penjelasan pemerintah sejauh ini masih umum, yakni kombinasi pendanaan **APBN, BUMN, KPBU dan swasta**.[59]

Benarkah uang APBN kita sanggup membiayai sesuai porsinya, saat kita masih ingat kisruh utang BPJS ke fasilitas kesehatan yang penuntasannya cukup alot [60, 61]. Pemerintah tampaknya lebih memilih menaikkan iuran BPJS menjadi 100 persen untuk menutup defisit pada tahun 2020 sebesar Rp44 triliun tetapi pada saat bersamaan uang Rp89 triliun akan tetap digelontorkan untuk proyek fisik ibu kota baru. Ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mementingkan proyek ibu kota dibandingkan kesehatan rakyat.

Benarkah BUMN kita dalam keleluasaan berinvestasi, jika pada saat yang sama kita mendengar cukup banyak kesulitan yang mereka hadapi untuk membiayai operasionalnya saat ini? **Utang luar negeri BUMN Indonesia terbilang mengkhawatirkan, mencapai USD 52,8 Milyar dan berdampak pada risiko kontingensi atau ketidakpastian untuk negara.**[62] Di antara BUMN yang mengalami kesulitan likuiditas termasuk berskala besar dan bekerja di industri konstruksi dan baja seperti Waskita, Krakatau Steel, Adhi Karya. [63] Bank Dunia menyatakan bahwa BUMN tidak sanggup membiayai infrastruktur jangka panjang Jokowi, contohnya utang PT. Waskita Karya

57 Tempo.co. 16 Mei 2019. Dias Prasongko. https://bisnis.tempo.co/read/1206079/ibu-kota-baru-simak-skema-pembiayaan-pembangunan-dari-bappenas

58 Kepala Bappenas : Berikut Skema Pembiayaan Ibu Kota Baru APBN (Rp93,5 Triliun) untuk: - Infrastruktur pelayanan dasar - Pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri - Pembangunan rumah dinas ASN/TNI/Polri - Pengadaan lahan - Ruang terbuka hijau - Pangkalan militer// KPBU (Rp265,2 Triliun) untuk: - Gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif - Pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN) - Sarana pendidikan dan sarana kesehatan - Museum dan lembaga pemasyarakatan - Sarana dan prasarana penunjang// Swasta (Rp127,3 Triliun) untuk: - Perumahan umum - Pembangunan perguruan tinggi - Science-technopark - Peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan toll - Sarana kesehatan - Shopping mall - https://tirto.id/skema-pembiayaan-ibu-kota-baru-dari-apbn-kpbu-hingga-swasta-eg93

Kepala Bappenas : Estimasi besarnya pembiayaan tadi di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau USD 33 miliar. Luas lahan 40 ribu hektare dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru. Dengan penduduk 1,5 juta di mana pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen. Sementara untuk skenario kedua dengan keperluan luas lahan yang lebih kecil, yakni 30.000 hektare, dikalkulasi membutuhkan biaya Rp323 triliun atau 23 miliar dolar AS. Untuk skenario kedua, jumlah orang yang bermigrasi yakni 870.000 jiwa terdiri dari aparatur sipil negara kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, aparat TNI dan Polri, dan pelaku ekonomi. - https://www.liputan6.com/bisnis/read/3953739/tak-andalkan-apbn-ini-sumber-dana-mega proyek-ibu-kota

59 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Dialog Nasional II : 26 Juni 2019. Dampak ekonomi dan skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara.

60 Grid Health. Gazali Sholahuddin. 17 Juli 2019. https://health.grid.id/read/351788148/bpjs-mempunyai-hutang-65-triliun-kepada-rumah-sakit-pihak-rs-sesak-napas-bayar-pegawai-juga-obat-dan-lainnya?page=all

61 Kompas. 16 April 2019. Akhdi Martin Pratama. https://money.kompas.com/read/2019/04/16/164049326/bpjs-kesehatan-bayar-utang-rp-11-triliun-ke-rumah-sakit

62 Menurut lembaga riset dan rating Moody

63 CNBC. 16 September 2016. Tirta Citradi. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190916161906-4-99779/bahaya-utang-bumn-disebut-mengkhawatirkan-seberapa-parah

MEMPERPARAH KRISIS SUMBER AIR DAN MENGANCAM KAWASAN LINDUNG DAN KONSERVASI TELUK BALIKPAPAN

Foto: ©JATAM Nasional dan JATAM Kaltim

Lokasi dipilihnya IKN adalah wilayah strategis dan pendukung kebutuhan sumber air bagi 5 wilayah sekaligus. Lima wilayah yang dimaksud yakni; Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara wilayah pesisir khususnya Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa serta Kecamatan Loa Kulu dan Kota Samarinda khususnya di bagian selatan.

Letak Kawasan IKN yang berada persis di antara hutan konservasi Taman Hutan Rakyat Bukit Suharto dan Hutan Lindung Sungai Wain serta Hutan Lindung Manggar akan mengancam keberlangsungan ketersediaan sumber air di 5 wilayah tersebut.

Dalam kondisi normal saja, Kota Balikpapan seringkali dihadapkan dengan krisis ketersediaan air bersih dan air minum. Setiap tahun Balikpapan mengalami krisis air.[64] Walaupun dalam tata ruang wilayah telah ditetapkan 52% wilayah kota adalah kawasan lindung, tetap saja warga Kota Balikpapan mengalami persoalan krisis air.

Bukan hanya menciptakan krisis air, IKN juga berada di kawasan ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan. Upaya perlindungan ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan timbul sebagai respon masyarakat terhadap masifnya konversi mangrove di bagian pesisir Kota Balikpapan kala itu. Banyak sekali pembangunan pelabuhan yang kemudian mengubah bentang pesisir Teluk Balikpapan menjadi pelabuhan-pelabuhan industri untuk mendukung operasionalisasi kegiatan dari sektor tambang, perkebunan kelapa sawit, industri semen, bahkan pembangkit listrik (PLTU). Sontak mengubah rona lingkungan yang pada awalnya dipenuhi mangrove, yang berfungsi sebagai area *fishing ground* bagi nelayan, lalu menjadi tempat sandar dan berlabuh kapal-kapal industri. Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan yang paling terdampak. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di pesisir merupakan nelayan tangkap ikan satu hari *(one day fishing)* yang kemudian menumbuhkan gerakan pemantauan ekosistem mangrove untuk menghentikan laju kerusakan. Jejak upaya konservasi Teluk Balikpapan yang sedang berproses.[65]

- 2011: Kajian RASI bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Teluk Balikpapan diusulkan sebagai Kawasan Konservasi
- 2015: Rekomendasi Yayasan RASI-Pembagian Konservasi Kawasan menjadi 4 zona di Teluk Balikpapan (3 kabupaten/kota yaitu PPU, Kota Balikpapan, dan Kutai Kartanegara)
- 2017: Usulan Koalisi CSO, Teluk Balikpapan Sebagai Kawasan Konservasi
- 2019: Surat Rekomendasi Wali Kota Balikpapan kepada Gubernur Kaltim, Teluk Balikpapan Sebagai Kawasan Konservasi
- 2019: Surat Rekomendasi Emil Salim kepada Gubernur Kaltim, Teluk Balikpapan Sebagai Kawasan Konservasi
- 2019: Identifikasi dan inventarisasi DLH, BKSDA, BPEE KLHK, sebagian Teluk Balikpapan diusulkan menjadi Kawasan Ekosistem Esensial[66]
- 2019: Staf Ahli KLHK Hani Hadiati, usulan Teluk Balikpapan sebagai Perhutanan Sosial[67]

Rencana pembangunan ring satu IKN tepat berada di atas ekosistem mangrove primer yang sudah diusulkan dan direkomendasikan sebagai kawasan konservasi atau area perlindungan oleh masyarakat. Harus kita ingat bahwa pembangunan dan aktivitas yang merusak ekosistem mangrove merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Arah kebijakannya jelas, berupa peningkatan status fungsi ekosistem mangrove ke dalam perlindungan, pengendalian konversi yang berprinsip kelestarian, dan ekosistem mangrove dikelola berbasis masyarakat.

Selain itu, hasil analisis FWI tahun 2018 dilakukan di Teluk Balikapapan untuk melihat Indeks Bahaya Banjir dan Indeks Kerentanan Banjir tepatnya di pesisir Teluk Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Hasil untuk Indeks Bahaya Banjir dengan nilai mencapai 0,75 terdapat di sebagian besar hulu Teluk Balikpapan yang notabene akan dibangun lokasi ring satu. Nilai Indeks Bahaya Banjir tersebut dikategorikan ke dalam zona bahaya tinggi banjir. Yakni pada peruntukan ruang perkebunan, hutan produksi tetap, hutan produksi konversi, pemukiman, kawasan perikanan, kawasan industri, dan kawasan tanaman pangan dan hortikultura.[68] Indeks Bahaya Banjir sendiri adalah nilai kemungkinan terjadinya banjir yang didasarkan frekuensi kejadian banjir pada masa lalu yang tinggi. Maka, rencana pembangunan IKN yang akan dibangun di sekitar pesisir Teluk Balikpapan sejatinya merupakan lokasi bahaya banjir yang didasarkan pada masa lalu yang sering terpapar banjir tinggi.[69]

Sementara itu, nilai Indeks Kerentanan Banjir berada pada rentang 0,25 sampai 0,75 yang tersebar di pesisir Teluk Balikpapan. Yakni berada pada peruntukan ruang kawasan perkebunan, kawasan perikanan, hutan produksi terbatas, hutan produksi konversi, dan kawasan industri.[70] Yang artinya, pesisir Teluk Balikpapan memiliki kemungkinan terpapar banjir jika curah hujan yang datang melebihi kondisi normal.[71]

Hasil analisis antara Indeks Bahaya Banjir dan Indeks Kerentanan Banjir dengan peta RTRW Kalimantan Timur memperlihatkan bahwa Teluk Balikpapan termasuk ke dalam areal yang paling memungkinkan terjadinya banjir. Sungguh disayangkan jika pembangunan akan dilakukan di atas ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan. Sedangkan ekosistem mangrove sendiri memiliki fungsi ekologis sebagai pelindung dari bahaya banjir dan gelombang pasang. Penataan ruang dan rencana pembangunan yang ada justru menjerumuskan diri ke dalam "jurang" bencana. ■

---

64 https://regional.kompas.com/read/2016/03/17/22410071/ Krisis.Air.Bersih.Wali.Kota.Balikpapan.Mengaku.Dimarahi.Warga?page=all
https://kalimantan.bisnis.com/read/20190918/407/1149915/krisis-air-warga-balikpapan-mulai-beli-air-tandon
https://www.tribunnews.com/regional/2019/09/17/balikpapan-terancam-krisis-air-bersih-air-baku-hanya-cukup-tiga-bulan
https://nasional.tempo.co/read/619426/krisis-air-bersih-layanan-pdam-balikpapan-digilir/full&view=ok

65 FWI. 2019. Status Dan Strategi Penyelamatan Ekosistem Mangrove Indonesia Studi Kasus: Ekosistem Mangrove Di Teluk Balikpapan Kalimantan Timur. Bogor: FWI.

66 Dalam FGD Pengusulan KEE Mangrove Kota Balikpapan pada tanggal 02 Oktober 2019

67 Disampaikan saat "FGD Pengusulan KEE Mangrove Kota Balikpapan pada tanggal 02 Oktober 2019"

68 Nomenklatur sesuai pada Perda RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

69 FWI. 2019. Status Dan Strategi Penyelamatan Ekosistem Mangrove Indonesia Studi Kasus: Ekosistem Mangrove Di Teluk Balikpapan Kalimantan Timur. Bogor: FWI.

70 Nomenklatur sesuai pada Perda RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

71 FWI. 2019. Status Dan Strategi Penyelamatan Ekosistem Mangrove Indonesia Studi Kasus: Ekosistem Mangrove Di Teluk Balikpapan Kalimantan Timur. Bogor: FWI.

(Persero) tahun 2017 melonjak dua kali lipat dari periode yang sama tahun sebelumnya akibat banyak membeli konsesi tol.[72]

Serta lebih lanjut, maukah swasta lokal berinvestasi di kota yang harus dibangun dari nol? Perlu diingat bahwa biaya membangun daerah pinggiran kota yang semula memang sudah hidup, seperti Jabodetabek, akan jauh lebih murah ketimbang kota yang dibangun dari nol. Kaitannya dengan biaya mendatangkan bahan baku, hingga ke perhitungan *return* keuntungan. Tentunya hal-hal seperti ini betul betul diperhitungkan oleh swasta lokal kita. **Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir kontribusi swasta hanya mencapai 10 persen dalam pembangunan infrastruktur**.

SEGALA CARA DILAKUKAN: PENJUALAN ASET NEGARA DAN TANAH

Kementerian Keuangan sedang menggali sumber pendanaan APBN yang mampu mewujudkan ibu kota baru. Direncanakan sumber dana APBN yang terpakai tidak akan lebih dari 19 persen[73] dari total pembiayaan. Untuk persentase itu pun, bangsa kita tampaknya harus mulai menggadaikan harta miliknya, melalui pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam hal ini adalah penjualan dan penyewaan aset negara[74], serta skema *joint venture*/kerjasama. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatatkan aset negara di DKI Jakarta sebesar Rp1.123 triliun, yang dikaitkan dengan adanya wacana untuk tukar guling aset demi membangun ibu kota baru.[75] Termasuk kawasan emas Sudirman, Thamrin, dan SCBD. BAPPENAS dan BCA telah melakukan valuasi atas 3 km di atas kawasan emas tersebut senilai Rp150 triliun yang diperoleh dengan cara menyewakan, menjual, dan memanfaatkannya secara komersial demi pembiayaan IKN.

Prinsip kehatian-hatian harus ditekankan di sini. **Lahan aset negara di DKI Jakarta untuk 'ditukargulingkan'**, tengah ramai diperbincangkan di media, **termasuk di antaranya yang berada di daerah premium dan strategis.** Lebih lanjut, ada nilai sejarah di beberapa bangunan pemerintahan atau aset-aset negara tersebut. Semua konsekuensi termasuk aspek legal dan rasa keadilan untuk generasi selanjutnya harus dipertimbangkan. Beberapa pihak menyarankan untuk menghindari opsi menjual tetapi memilih opsi pengelolaan oleh BUMN.[76] Semua pendapat harus didengarkan. Banyak pekerjaan rumah dan konsultasi yang pemerintah perlu lakukan.

> **"Misalnya kita jual Rp 2 juta per meter saja harganya, kita sudah bisa dapat Rp 600 triliun," kata Jokowi.**[77]

Bukan hanya menjual aset negara yang ada di Jakarta, Presiden Jokowi mengusulkan menjual tanah seluas 30.000 hektar dari 180.000 hektar total lahan yang dialokasikan untuk kawasan IKN. Menurut Jokowi, dengan mematok harga Rp2 juta permeter pemerintah sudah bisa mendapatkan Rp600 triliun untuk membiayai mega proyek pemindahan ibu kota ini. Usul aneh ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menghalalkan segala cara demi proyek IKN.

MEMBIAYAI IBU KOTA BARU DENGAN INVESTASI ASING

Pada awal ide ini dihembuskan, yakni sebelum masa pencoblosan pilpres 2019, belum banyak terdengar pemerintah menyebutkan kata investasi asing dalam konteks membangun ibu kota baru. Namun, pada Agustus-September 2019, tampaknya ada nada yang sedikit melunak.

72 CNN Indonesia. Bank Dunia Sebut BUMN tidak sanggup biayai infrastruktur Jokowi. 4 Januari 2019 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190104185401-532-358591/bank-dunia-sebut-bumn-tak-sanggup-biayai-infrastruktur-jokowi

73 Warta ekonomi. https://www.wartaekonomi.co.id/read242456/pindah-ibu-kota-sedot-19-persen-dana-apbn-bambang-kecil-itu.html

74 CNN . 25 September 2019. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190925200053-532-434039/sri-mulyani-usul-jual-aset-negara-demi-pindah-ibu-kota

75 https://nasional.kontan.co.id/news/dki-jakarta-saat-ini-memiliki-aset-rp-1123-triliun-bakal-ditukar-guling

76 Kompas.com. 8 Agustus 2019. Dani Prabowo. https://properti.kompas.com/read/2019/08/08/114634421/ketimbang-ditukar-guling-aset-negara-diusulkan-dikelola-bumn

77 https://katadata.co.id/berita/2019/09/05/lahan-di-ibu-kota-baru-bisa-dibeli-dengan-syarat-tingkat-penghasilan

Pada September 2019[78], Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa **Tiongkok tertarik untuk berinvestasi** dalam sektor transportasi publik di ibu kota baru. Hal ini ia sampaikan pasca-pertemuan dengan pihak China Railways Construction Corporation (CRCC) di kantornya. Namun keesokan harinya[79], Luhut Binsar Pandjaitan berbalik menyatakan pembangunan ibu kota baru tidak melibatkan pembiayaan dari Tiongkok. Menurutnya, sumber dana domestik masih memadai untuk membiayai pembangunan ibu kota baru.

Namun, tampaknya ini bukan akhir dari percakapan perihal investasi asing di ibu kota baru. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala BAPPENAS Bambang Brodjonegoro mengatakan, menegaskan pemerintah akan mengutamakan pendanaan dari dalam negeri. **Namun, pemerintah tidak menutup diri dari investasi asing dalam proyek pembangunan ibu kota baru**. Investor asing yang ingin masuk diarahkan membentuk perusahaan patungan, bekerja sama dengan swasta lokal dan BUMN. Hal ini disambut oleh BUMN Indonesia, salah satunya PT. Wika Karya (Persero) yang menyatakan biasa bekerja sama dengan Jepang, Korea dan Tiongkok.[80]

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA-NEGARA LAIN

Dalam sejarah dunia, telah terjadi berbagai pemindahan ibu kota di berbagai negara. Ada lokasi kota baru yang dipilih dengan harapan memicu pertumbuhan daerah yang kurang berkembang, ada kota baru yang dipilih karena dianggap netral dari konflik.

Pada bagian-bagian sebelumnya, kami telah membahas banyak tentang rambu-rambu yang perlu diwaspadai terkait krisis lingkungan dan sosial yang sudah terjadi dan dapat bertambah akibat mega proyek IKN. Pada bagian ini kita akan melihat berbagai catatan, pelajaran dari mega proyek di negara-negara lainnya:

- Perpindahan ibu kota baru adalah mega proyek senilai **$32.7 milya**r[81]. Pemerintah masih mengharapkan nilai besar itu tertutup dari APBN, Rp466 triliun (BUMN, KPBU dan swasta *(lihat bagian: "Ibu Kota Uang Siapa")*. Menurut sebuah penelitian[82] atas kasus-kasus mega proyek di beragam belahan dunia menunjukkan bahwa **9 dari 10 mega proyek akhirnya mengalami *over-budget***. Penyebabnya beragam, untuk infrastruktur transportasi dapat berupa kesalahan mengestimasi permintaan *(demand)*, sehingga sisa kerugiannya harus ditanggung pemerintah.
- Dalam paparannya pada media dan publik, pemerintah berusaha meyakinkan publik dengan mengambil **Putrajaya (Malaysia)**[83] dan **Brasilia (Brazil)**[84] sebagai contoh kisah sukses inspirasi pemindahan kota dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Contoh kota tersebut yang membuat Presiden Jokowi optimis bahwa tahun 2024, pada akhir masa jabatannya, sebagai tahap 1 semua badan eksekutif sudah berhasil dipindahkan ke IKN, menyusul perpindahan tahap kedua, pemerintah akan membangun fasilitas lain seperti stasiun, universitas, dan kantor non-kementerian atau lembaga-lembaga tinggi.[85]

Namun, pemerintah dan publik harus menyadari konsekuensi sumber daya yang perlu dimiliki serta apa usaha keras yang harus dilakukan untuk menjaga kepentingan masyarakat lokal dan alam di

78 DetikFinance. Herdi Alif Al Hikam. 2 September 2019 https://finance.detik.com/properti/d-4690675/china-pengin-garap-transportasi-ibu-kota-baru-ri-di-kaltim

79 CNN Indonesia. 04 September 2019. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190903150612-532-427155/bantah-amien-rais luhut-sebut-tak-ada-china-di-ibu-kota-baru

80 Republika. Dedy Narwaman Nasution, Novita Intan, Adinda Pryanka, Wilda Fizriyani/ Red: Karta Raharja Ucu. 5 September 2019. https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/pxe20j383/nasional/news-analysis/19/09/05/pxc49r282-pemerintah-terbuka-investasi-asing-ikut-bangun-ibu-kota-baru

81 Nikkei Asian Review. 26 Agustus 2019. Erwida Maulia.https://asia.nikkei.com/Politics/Jokowi-announces-Indonesia-s-new-capital-in-East-Kalimantan

82 Flyvbjerg, Bent, What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview (April 7, 2014). Project Management Journal, April/May 2014. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2424835

83 Tempo.co. 21 Agustus 2019. Francisca Christy Rosana. https://bisnis.tempo.co/read/1238561/wawancara-khusus-jokowi-pindah-ibu-kota-belajar-dari-malaysia/full&view=ok

84 Tempo. 2 October. 2019. Reporter Antara. https://bisnis.tempo.co/read/1254756/bappenas-sebut-negara-ini-pindahkan-ibu-kota-kurang-dari-5-tahun/full&view=ok

85 Tempo.co. 21 Agustus 2019. Op.Cit.

CERITA KEPUNAHAN DI IBUKOTA BARU

ORANGUTAN KALIMANTAN (FAUNA ENDEMIK)

Orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia. Kini, 90% orangutan hanya ada di Indonesia (Sumatera dan Kalimantan), sementara sisanya di Sabah dan Sarawak, Malaysia.

Ada tiga spesies: orangutan sumatera, orangutan kalimantan, dan orangutan tapanuli. Namun, ketiganya berstatus hampir punah [Critically Endangered] oleh International Union for Conservation of Nature [IUCN]. Diperkirakan terdapat 139 orangutan yang tersisa saat ini di BOS (Borneo Orangutan Survival) Samboja Lestari, Kalimantan Timur.

BEKANTAN (HANYA ADA DI KALIMANTAN)

Satwa endemik Kalimantan bernama latin Nasalis larvatus hidup di ekosistem hutan mangrove seperti di Teluk Balikpapan. Konversi habitat, perburuan, kebakaran hutan, dan illegal logging menyebabkannya terdesak. Data dari Kelompok Pengelola Mangrove Center Graha Indah Balikpapan, pada 2018, populasinya hanya 300 ekor.

Bekantan memakan jenis buah, bunga, kulit pohon, serangga, dan kepiting. Bekantan adalah hewan yang gemar memakan pucuk-pucuk daun muda pohon bakau. Karena itu, eksistensi hutan bakau (mangrove) harus dijaga kelestariannya. Bekantan dilindungi hukum Indonesia dan jenis ini masuk daftar CITES Apendix I yang artinya tidak boleh diperdagangkan. IUCN memasukkan statusnya Genting [Endangered].

SEPAKU

SEPAN

BALIKPAPAN

PENAJAM

LABANGKA

LONGKALI

SUKU ASLI

Masyarakat asli Kabupaten Penajam Paser Utara seperti Suku Balik berada di ring satu. Terdapat 150 keluarga Suku Balik yang tinggal di Kelurahan Pemaluan. Dahulu Suku Balik hidup makmur dengan sumber makanan berlimpah.

Mereka menghadapi hantaman pertama pada tahun 60-an ketika perusahaan kayu masuk ke Kalimantan Timur. Sejak itu hidup warga mulai sulit. Sebagian warga berpindah. Mereka mulai bergantung pada produksi pangan baru. Secara perlahan kehilangan budaya upacara karena ikatan dengan alam terputus. Begitu juga dengan gaya hidup saling berkumpul dan bercerita yang sudah diwariskan antargenerasi, berubah menjadi lebih individualis.

Perpindahan ibu kota dan pegawai dalam jumlah besar ke kampung mereka akan menjadi hantaman kedua. Mulai dari tekanan pada lingkungan, hingga kesenjangan ekonomi antara pendatang atau pegawai pemerintah dengan warga setempat seperti yang dikhawatirkan masyarakat Paser Balik.

PESUT DAN TUMPAHAN MINYAK

Maret 2018, sekitar 400 barel minyak mentah milik Pertamina tumpah di Teluk Balikpapan. Kementerian LHK menyebut tumpahan itu mengancam satwa dilindungi pesut Mahakam dan Bekantan.

Menteri LHK Siti Nurbaya dalam rapat dengan Komisi VII, 16/4/2018: "Hasil analisis citra satelit, kami melakukan sampel kualitas air di 15 titik. Pesut Mahakam dan bekantan ini terancam punah. Ini gara gara tumpahan minyak."*

Pesut Mahakam adalah lumba-lumba air tawar dengan status konservasinya "genting". Hingga April 2019, setidaknya 4 ekor pesut ditemukan mati**. Aktifitas lalu lalang kapal tongkang yang membawa batubara telah mengganggu habitatnya. Dengan adanya peningkatan aktifitas di teluk Balikpapan baik untuk pembangunan ibukota maupun setelah ibukota akan membuat satwa langka ini semakin tidak aman.

*BBC Indonesia/4April2018
**Mongabay.co.id/1Nov2019

tengah mewujudkan **keinginan IKN yang tergesa gesa. Dikhawatirkan pada perjalanannya, semua perhatian tertuju pada "target waktu 2024", sehingga janji-janji pemerintah dalam pidato kenegaraan dan *press conference* yang kita dengar dari Jakarta saat ini, yakni janji untuk menghormati alam dan komunitas lokal, pada kenyataannya tidak sanggup diwujudkan di lapangan.**

Dalam kasus pemindahan Ibu Kota Putrajaya, Malaysia. Pada 1993, Mahathir memperoleh persetujuan Parlemen Malaysia untuk memindahkan pusat pemerintahan (administrasi). Ibu kota tetap Kuala Lumpur, tetapi Malaysia **hanya 'menggeser' pusat pemerintahan administratif** ke Putrajaya yang berjarak **tidak lebih dari 60 kilometer** dari Kuala Lumpur (25 km Selatan Kuala Lumpur, 50 km dari Bandara Internasional KL). Dibangun sejak 1994 dan menghabiskan biaya sekitar **Rp85 triliun** [86] , Putrajaya resmi dijadikan sebagai pusat pemerintahan Malaysia pada 1999. Dari tiga aspek di atas: skala aktivitas yang dipindahkan, jarak lokasi dan waktu, Putrajaya **bukan contoh *apple to apple*** dengan IKN Indonesia, karena pemindahan ibu kota masih di dalam satu pulau dan hanya bergeser tidak lebih dari 60 km. Sebaliknya, rencana pemindahan ibu kota Indonesia adalah rencana pemindahan antarpulau sehingga mengambil contoh perpindahan ibu kota Putrajaya menjadi tidak relevan.

Sedangkan dalam kasus pemindahan ibu kota Brazil, Brasilia. Pada 1956, pemindahan ibu kota negara mulai dilakukan dari Rio De Janeiro ke Brasilia. Saat menjadi pembicara di salah satu acara, Kepala BAPPENAS [87] Indonesia (saat itu) menjelaskan *"Membutuhkan waktu tidak lebih dari lima tahun untuk membuat kota yang dibangun dari nol dan sudah beroperasi sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota negara,"* Bahwa pemerintah Brasil di bawah pimpinan Presiden Juscelino Kubitschek saat itu merasa ada ketimpangan yang luar biasa antara masyarakat yang tinggal di daerah pantai dengan masyarakat di daerah Sungai Amazon. **Sekilas, agak mirip dengan isu IKN kita saat ini. Namun, lebih dari 50 tahun kemudian, apa yang terjadi pada Brasilia?**

Kota baru tersebut menimbulkan masalah, di antaranya pembangunan dan kesejahteraan yang tidak merata. Brasilia dianggap tidak bisa menangani pertumbuhan demografi. Warga yang tak punya banyak uang terdorong untuk hidup di daerah pinggiran/kota penyangga, karena tidak mampu membeli perumahan di kota baru, Mereka bekerja untuk staf pemerintahan yang kini dianggap kaum yang lebih elit dan hidup di sentra ibu kota. PBB pernah memberi predikat pada **Brasilia sebagai kota dengan kesenjangan paling tinggi.** [88] ■

REKOMENDASI/ SERUAN

1. Mencabut keputusan dan membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara baru dengan cara memprioritaskan APBN untuk pemenuhan kebutuhan dan hak dasar rakyat.
2. Memulihkan krisis sosial ekologi yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan Timur.

86 Sarah Moser. 2010. Putrajaya: Malaysia's new federal administrative capital. Cities, 27 (2010): 285–297. BBC News Indonesia. 29 Oktober 2010. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/10/101029_seri4jakartapindah

87 Kepala Bappenas (sebelumnya) pada gelar wicara bertajuk 'Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara' di Balikpapan, Selasa malam, 1 Oktober 2019.

88 Reuters. 21 April 2010. Ana Nicolaci Da Costa. https://www.reuters.com/article/us-brazil-brasilia-idUSTRE63K4CT20100421

PENYUSUN

Merah Johansyah, Pradarma Rupang, Tommy Apriando, Zamzami, Hilda Meutia, Ahmad Saini, Zenzi Suhadi, Ahmad Ashov Birry, Marina Nasution, Yuyun Indradi, Anggi Putra Prayoga.

DESIGN LAYOUT

Kakiketjil

PETA DAN ILUSTRASI

Ahmad Saini, Pradarma Rupang, Andrean Eka Lucianto, Eko Faizin, Kakiketjil.

FOTO

JATAM Nasional dan JATAM Kaltim

PUBLIKASI BERSAMA OLEH

FOREST WATCH INDONESIA
JATAM
JATAM KALTIM
POKJA 30
POKJA PESISIR DAN NELAYAN
TREND ASIA
WALHI
WALHI KALTIM